

## BAB 2

### MASALAH IDENTITAS MARJINAL DI TENGAH MASYARAKAT DAN DI DALAM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK JERMAN

#### 2.1 Struktur Pemerintahan Republik Federal Jerman: Posisi sang Kanselir

Struktur pemerintahan Federal Jerman terdiri dari tiga bagian: Legislatif (*Bundestag* dan *Bundesrat*), Eksekutif (Kanselir, Kabinet, dan Birokrasi), dan Yudisial.<sup>1</sup> Dalam struktur parlemen Jerman, kekuasaan antara *The Bundestag* dan *The Bundesrat* dipisahkan dan dibatasi satu sama lain berdasarkan basis legitimasinya. *The Bundesrat* (majelis tinggi) mempresentasikan *Länder* (negara bagian) dan negara, maka orang-orang yang duduk di dalamnya adalah wakil-wakil yang tidak dipilih langsung oleh rakyat.<sup>2</sup>

Sedangkan *the Bundestag* (majelis rendah), yang merupakan otoritas legislatif yang tertinggi. Para anggotanya adalah wakil rakyat yang dipilih, untuk masa jabatan empat tahun, oleh masyarakat pemilih. Warga negara Jerman berusia 18 tahun keatas dapat memilih wakilnya secara langsung, bebas, setara dan rahasia dalam satu prosedur pemilihan yang menggabungkan sistem pemilihan langsung calon dengan sistem perwakilan proporsional: setengah dari wakil dipilih langsung, sementara setengah lainnya melalui daftar sistem partai yang kompleks. Hal ini dilakukan agar para wakil itu mewakili kehendak rakyat, agar mereka tidak mewakili terlalu banyak kehendak atau terlalu banyak orang sehingga dapat menjadi, seperti pada masa lalu, terpecah-pecah. Karena sifat dari sistem pemilihan ini, jumlah wakil dalam *Bundestag* tidak benar-benar tetap. Dalam tugasnya untuk membuat undang-undang, *Bundestag* memiliki beberapa kewenangan, antara lain: memilih Kanselir Federal (pemimpin yang ditunjuk oleh partai terkuat) dan menjaga kontrol terhadap pemerintahan. Dengan demikian, kelompok-kelompok minoritas di *Bundestag* dapat

---

<sup>1</sup> Susan Stern, *Meet United Germany: Handbook 1991/1992*, (Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, 1991), hlm. 13.

<sup>2</sup> Thomas Meyer dan Nicole Breyer, *The Future of Social Democracy*, (New Delhi: Samskriti, 2007), hlm. 210.

mengajukan permintaan informasi dari pemerintah atau permintaan penunjukan komite penyelidikan.<sup>3</sup>

Menteri-menteri Federal dicalonkan oleh Kanselir dan ditunjuk secara resmi oleh Presiden Federal. Disinilah Kanselir memiliki kekuatan yang besar: Kanselir menetapkan pedoman kebijakan untuk pemerintahan, termasuk tentang bagaimana para menteri menjalankan kementerian mereka masing-masing. Kanselir dan kabinetnya dapat membuat keputusan politik yang mayor, tetapi bertanggung-jawab kepada parlemen (*Bundestag*) atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Adalah satu kemungkinan bagi *Bundestag* untuk mengganti pemerintahan melalui sebuah mosi tidak percaya terhadap Kanselir.

*Bundesregierung* (pemerintah Federal) terdiri dari Kanselir Federal dan kabinet menteri-menteri Federal. Kanselir Federal secara resmi diajukan oleh Presiden Federal untuk dapat dipilih oleh *Bundestag*, dimana setiap partai politik mengumumkan kandidat calon Kanselirnya sebelum Pemilu, dan kandidat dari partai politik pemenanglah yang akan menjadi Kanselir Federal Jerman. Di *Bundestag* sendiri biasanya tidak ada satu partai yang memegang mayoritas. Maka untuk pemilihan Kanselir pada umumnya harus dibentuk koalisi, yaitu persekutuan antara beberapa partai.<sup>4</sup>

Untuk melanjutkan struktur pemerintahan dan memilih anggota *Bundestag* yang baru, masyarakat Jerman dapat berkontribusi dalam proses Pemilu. Menjelang Pemilu, terdapat beberapa isu yang turut mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Di antaranya, adalah "identitas marjinal" yang diangkat dalam skripsi ini.

---

<sup>3</sup> Stern, *Op. Cit.*, hlm. 13-15.

<sup>4</sup> Rainer Geißler, "Masyarakat Jerman – Modern, Majemuk dan Terbuka," diperoleh dari <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/gesellschaft/main-content-08/masyarakat-Jerman-modern-majemuk-dan-terbuka.html> diakses pada 8 September 2008 pukul 13.42 WIB.

## 2.2 Masalah Identitas Marjinal Perempuan dan Orang (Bekas) Jerman Timur dalam masyarakat Jerman

### 2.2.1 Posisi Perempuan dalam Masyarakat Sosial Politik Jerman

Posisi perempuan di tengah struktur masyarakat Jerman yang patriarki telah berkembang dari masa ke masa. Sebelum tahun 1870, satu-satunya ruang publik bagi kaum perempuan adalah di dapur dan kegiatan amal. Paska 1914, muncul masa kekaisaran (*Kaiserreich*) yang merumuskan formula baru akan posisi perempuan dalam masyarakat secara lebih kritis. Di dalam *Kaiserreich* perempuan menjadi, untuk pertama kalinya, faktor vital dalam industri produksi dan jasa, sebagai pekerja. Dan untuk para “perempuan muda” dari kelas menengah, jalan mereka pun terbuka untuk sistem pendidikan, profesi-profesi, dan, akhirnya, untuk arena partai politik.<sup>5</sup>

Namun pada tahun-tahun setelah perang, perempuan kembali dijadikan sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas keluarga. Dan dalam pekerjaan, terdapat kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Posisi perempuan tidak menguntungkan berkenaan dengan hal kualifikasi, status, posisi kepemimpinan atau, memang, untuk sekedar mengemukakan aspirasi mereka dalam dunia yang didominasi oleh laki-laki. Bagi rata-rata perempuan Jerman Barat pada era 1940-1950an, kehidupan normal bagi mereka adalah seputar kehidupan privat; keluarga, suami dan mereka tidak bisa bekerja. Untuk bekerja pada masa itu, tidak dianggap sebagai sebuah tujuan pribadi serta langkah menuju kesetaraan bagi perempuan pada umumnya.<sup>6</sup>

Sekarang, konstitusi dasar negara Jerman memang menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Juga tertulis bahwa Negara harus mengobservasi kesetaraan ini. Dalam kata lain, persoalan untuk mengakhiri diskriminasi gender adalah bagian dari permasalahan negara.<sup>7</sup> Namun apakah hal ini menjadi jaminan bagi posisi perempuan dapat setara dengan laki-laki di Jerman?

<sup>5</sup> Richard J Evans, *Rethinking German History Nineteenth-Century Germany and the Origins of the Third Reich*, (London: Harper Collins Academic, 1987), hlm. 223-224.

<sup>6</sup> Gordon Smith, William E. Paterson, and Peter H. Merkl, *Developments in West German Politics*, (Durham: Duke University Press, 1989), hlm. 260.

<sup>7</sup> Carola Reimann, “Germany” dalam *Young Women =New Politics?!: Expectations and Experiences from Asia and Europe*, (Bangkok: Friedrich Ebert Stiftung, 2000), hlm. 16.

Karena masih ada ketimpangan pendapatan maupun pelanggaran terhadap hak perempuan di Jerman sekarang ini.

Dalam politik, kendala ideologis dan psikologis bagi perempuan dalam memasuki parlemen mencakup, salah satunya, ideologi gender, pola-pola kultural, maupun peran sosial. Di banyak Negara, tradisi tetap berlaku untuk menekan, dan sering mendikte, peran utama perempuan sebagai ibu dan istri. Sistem nilai patriarki, kaku, tradisional menampilkan peran-peran yang tersegregasi secara seksual, dan ini disebut sebagai “nilai-nilai kultural tradisional” yang menghalangi terhadap kemajuan, perkembangan dan partisipasi perempuan dalam berbagai proses politik. Masyarakat di seluruh dunia didominasi oleh suatu ideologi tentang “kedudukan perempuan”. Menurut persepsi ini, perempuan tidak harus memainkan peran “ibu yang bekerja”, yang secara umum diupah rendah dan apolitis. Di samping itu, di beberapa negara berkembang, laki-laki bahkan mengajarkan kepada perempuan bagaimana cara memilih.<sup>8</sup>

Sekarang ini memang kian disadari bahwa budaya yang berlaku umum dalam politik adalah budaya yang berorientasi pada laki-laki dan berasal dari filsafat politik yang mengatakan bahwa batasan-batasan bagi perempuan dan urusan atau persoalan mengenai perempuan adalah hanya terletak pada ruang privat dan kehidupan rumah tangga. Pembagian yang berkembang antara kehidupan privat dan publik, yang menjadi semakin tersektorisasi dan hirarkis, bahkan menjadi bertentangan terhadap perempuan. Sejarah ketidak-terwakilkannya perempuan erat kaitannya dengan status mereka yang rendah dan inferior di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Ini adalah kondisi lingkungan yang banyak dihadapi oleh perempuan – yakni suatu imajinasi kolektif yang pasti tentang perempuan dalam peran-peran tradisional, dan apolitis yang terus berlangsung. Imajinasi tentang seseorang pemimpin perempuan pun harus bersifat aseksual dalam berbagai sikap dan pernyataannya,

---

<sup>8</sup> Nadezdha Shvedova, “Kendala-Kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen” dalam Azza Karam, *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hlm. 29-30.

<sup>9</sup> Ranjana Kumari dan Anju Dubey, *Women parliamentarians*, (New Delhi: Har-Anand Publications, 1994), hlm. 35.

karena seseorang bahkan dapat diidentifikasi sebagai perempuan hanya melalui ciri-ciri nonseksualnya. Seringkali tidak dapat diterima, atau bahkan memalukan dalam kesadaran masyarakat, bahwa perempuan menjadi terbuka mengenai hakikat kefemininannya. Dalam arena politik, seorang perempuan dituntut untuk dapat bersikap lebih otoritatif dan “jantan” (*manly*). Perempuan harus cocok terhadap aturan permainan laki-laki yang tidak tertulis. Inilah mengapa, politisi perempuan pada umumnya, dan perempuan anggota parlemen khususnya, harus mengatasi kesulitan yang tidak menyenangkan ini dalam arena politik – seakan-akan mereka berada di suatu tempat yang bukan tempat mereka, dan berperilaku dengan cara-cara yang tidak alamiah bagi mereka.<sup>10</sup>

Di Jerman barat, kaum perempuan Jerman memasuki era paska-perang dengan legalitas khusus akan praktek-praktek demokrasi. Sistem politik *Weimar* didominasi oleh laki-laki. Meskipun perempuan telah memenangkan hak pilih aktif dan pasif pada tahun 1918 dan telah berhasil meraih 10% kursi dalam Majelis Nasional pada tahun 1919, tetap saja mereka tidak dapat terus meningkatkan kehadiran politik mereka dalam *Reichstag* (satu bentuk sistem parlementer pada satu masa pemerintahan) atau untuk mengembangkan posisi mereka di dalam pemerintahan, di dalam kepemimpinan partai, atau di tingkat lain elit politik. Keberadaan sebagian besar perempuan terbatas pada bagian-bagian perempuan dalam partai politik atau pada gerakan perempuan yang terbagi-bagi, seperti dalam masyarakat secara keseluruhan, di sepanjang garis sektarian dan partisan.<sup>11</sup>

Namun, jika ditilik pada waktu yang cukup jauh ke belakang, 48% dari tenaga kerja di GDR adalah perempuan. Dan pada masa itu, perempuan mendapat bayaran yang sama dengan laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang sama. Hal ini dikaitkan dengan kondisi mereka di Jerman Timur yang berbeda dengan Jerman Barat yang mengalami keajaiban ekonomi. Di Jerman Timur, para perempuan harus bekerja keras. Para perempuan memiliki waktu yang sangat sedikit sekali untuk bergunjing dan para laki-laki tidak mengejar perempuan seperti yang bisa mereka lakukan di

<sup>10</sup> Shvedova, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>11</sup> Gordon Smith, William E. Paterson, and Peter H. Merkl, *Developments in West German Politics*, (Durham: Duke University Press, 1989), hlm. 259-260.

Jerman Barat. Dan jika di Jerman Barat seorang perempuan merasa dihargai ketika mereka menikah, maka di Jerman Timur ia akan merasa dihargai karena ia bekerja.<sup>12</sup>

Di Jerman paska re-unifikasi, faktanya, hanya sedikit perempuan yang bergabung dalam politik dibandingkan dengan laki-laki. Padahal perempuan meliputi setengah dari populasi masyarakat Jerman, namun telah menjadi minoritas dalam parlemen untuk waktu yang lama.<sup>13</sup> Hanya dua partai Jerman, SPD dan Partai Hijau (*Green Party*) yang mengembangkan sistem kuota terhadap perempuan.<sup>14</sup> Dalam CDU dan *Christian Social Party* (CSP), juga di *Free Democratic Party* (FDP), persentase dari representasi perempuan berada di bawah rata-rata.<sup>15</sup>

Partai Hijau lah yang telah mengambil peran utama dalam perdebatan kuota ketika mereka mengubah undang-undang partai mereka pada tahun 1985, untuk membuat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu kewajiban. Dan Partai Hijau telah berhasil memobilisasi suara perempuan. Untuk lebih spesifiknya: generasi perempuan dari masa perang dan pra-perang hampir tidak tertarik pada Partai Hijau dan banyak yang tetap setia kepada CDU. Generasi yang sangat termuda, yang lahir sekitar tahun 1970 dan mencapai usia pemilih pada akhir tahun 1980-an, tampaknya lebih obyektif bagi semua partai politik, termasuk Partai Hijau. Dalam pemilu Federal tahun 1987, sekitar 40% dari kelompok ini tidak memilih. Generasi ini adalah generasi tengah, yaitu para perempuan yang mengalami tahun 1960an dan 1970an sebagai remaja dan atau menjadi dewasa (muda). Pada awalnya, mereka melihat Sosial Demokrat sebagai partai demokratisasi dan kesetaraan, kini mereka melihat Partai Hijau sebagai pihak yang bisa hidup dengan janji-janjinya. Hal ini bukan bermaksud mengatakan bahwa seluruh kelompok usia telah berayun ke Partai Hijau, melainkan di antara kelompok usia ini, Partai Hijau telah berhasil

---

<sup>12</sup> Joseph Wechsberg, *Journey Through the Land of Eloquent Silence*, (Canada: Little, Brown & Company, 1964), hlm. 70-73.

<sup>13</sup> Carola Reimann, "Germany" dalam *Young Women =New Politics?!: Expectations and Experiences from Asia and Europe*, (Bangkok: Friedrich Ebert Stiftung, 2000), hlm. 16.

<sup>14</sup> Anne Seyfferth, "The Importance of Women's Participation in Local Government and Administration" dalam *Women Claim their Rights in Local Politics: Strategies to Increase Women's participation in Local Government and Administration*, (Bangkok: Friedrich Ebert Stiftung, 1994), hlm. 21.

<sup>15</sup> Reimann, *Op. Cit.*, hlm. 17.

memenangkan beberapa sumber dukungan, sebagai pimpinan bagi hak perempuan untuk mencapai kesetaraan. Beberapa wanita telah mengubah preferensi partainya menjadi mendukung Partai Hijau atau memilih Partai Hijau begitu mereka cukup umur untuk memilih. Satu dekade sebelumnya wanita ini akan tampak condong ke arah SPD untuk alasan yang sangat mirip. Dengan ini, Partai Hijau pun telah membuat kontribusi besar untuk mengurangi ketidakseimbangan perwakilan gender di parlemen.<sup>16</sup>

Sejak itu, isu kesempatan politik yang sama bagi perempuan telah menjadi lebih mendesak dan lebih khusus lagi terkait dengan pengenalan kuota numerik. Pemilu 1987 adalah yang pertama kali akan didominasi oleh perdebatan kuota. Bahkan CDU-CSU dan FDP yang menentang kuota formal, mencalonkan lebih banyak perempuan daripada di masa lalu dan perlahan-lahan meningkatkan jumlah perempuan pemegang jabatan di dalam partai dan di dalam anggota parlemen. Dalam SPD, keterwakilan perempuan dalam parlemen telah meningkat sebesar 30 persen sejak pertengahan 1980-an sebagai bentuk penekanan baru akan kesetaraan akses yang mulai menggigit. Secara keseluruhan, 40 persen lebih banyak perempuan memegang kursi parlemen pada tahun 1988 dibandingkan tahun 1985; dengan aturan bahwa tidak kurang dari separuh calon legislatif mereka adalah harus perempuan. Hal ini membuat perempuan dalam SPD selalu berjumlah lebih banyak daripada di partai lain, anggapan mengenai fungsi utama mereka adalah sebagai pencipta lingkungan keluarga, di mana generasi masa depan Sosial Demokrat akan dibesarkan.

Generasi perempuan yang lebih muda, yang bergabung di tahun 1970-an, mendefinisikan peran politik perempuan dengan lebih tegas: yaitu dalam pengertian terciptanya perwakilan yang sama di parlemen dan di dalam partai politik bagi perempuan dan menganggap organisasi perempuan sebagai kelompok penekan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Setelah bertahun-tahun memohon untuk kesetaraan, dan dalam menghadapi peningkatan ketergantungan SPD terhadap dukungan elektoral (dukungan suara untuk Pemilu) dari perempuan, partai politik kini telah

---

<sup>16</sup> Gordon Smith, William E. Paterson, and Peter H. Merkl, *Developments in West German Politics*, (Durham: Duke University Press, 1989), hlm. 261-262.

bergerak ke arah peraturan mengenai kuota, yang dirancang untuk menjamin bahwa pada pertengahan tahun 1990, tidak kurang dari 40 persen dari posisi-posisi dalam parlemen dan partai politik harus dipegang oleh perempuan.

Meskipun tren positif yang terjadi sejak Pemilu 1983 ini memperlihatkan peningkatan anggota perempuan, namun masih ada beberapa masalah yang tertinggal. Jumlah perempuan yang berhasil terpilih masih minim untuk mencapai kesetaraan. Alasannya adalah, dibandingkan dengan laki-laki, perempuan berada di posisi yang lebih tidak menguntungkan (dalam daftar partai). Bukan hanya rintangan seperti itu saja yang harus dihadapi perempuan. Perempuan mendapat kelompok pemilih (konstituen) dimana posisi perempuan justru bersifat marginal di dalamnya. Sedangkan laki-laki mendapat kelompok pemilih yang dimana, dalam kelompok pemilih itulah, mereka lebih cenderung untuk dipilih. Hal ini jelas bukan bentuk perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa periode Pemilu (sekitar enam periode dari tahun 1949 sampai 1965 dan tiga periode dari tahun 1985 sampai 1993), persentase dari kepemimpinan perempuan di *Bundestag* dan di dalam pemerintahan berada di bawah persentase anggota perempuan di parlemen. Dalam tulisan Carola Reimann, pada satu konferensi perempuan di Bangkok tahun 2001, dikemukakan bahwa untuk seorang kepala perempuan dalam pemerintahan Federal, sekarang ini, masih tidak terbayangkan. Mencapai posisi teratas, bagi perempuan, adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk sekarang ini. Meskipun CDU yang konservatif memiliki pemimpin perempuan pertama dalam sejarahnya (Merkel saat itu telah menjadi pemimpin CDU), perempuan masih hanya dapat mencapai sedikit sekali posisi-posisi yang tinggi (teratas). Masalah ini pun telah menjadi topik diskusi dalam beberapa tahun belakangan.<sup>17</sup>

### **2.2.2 Posisi Masyarakat (bekas) Jerman Timur dalam Masyarakat Jerman Bersatu**

Re-unifikasi sebagai satu proses yang damai cukup jarang terjadi untuk sejenis pergeseran keseimbangan kekuasaan yang terbilang besar, seperti yang

---

<sup>17</sup> Carola Reimann, *Op. Cit.*, hlm. 16-18.



dialami Jerman. Struktur Federal tradisional Jerman dipertahankan secara internal, dan secara eksternal bertemu dengan integrasi kawasan-kawasan intra-Eropa yang semakin terpadu (seperti *European Community (EC)*, *Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE)*, *The North Atlantic Treaty Organization (NATO)*, dan Dewan Eropa). Oleh karena itu kesatuan internal dalam negara masih harus dicapai. Ada kebutuhan untuk mencari tempat di tengah masyarakat Eropa, untuk memperbesar dan mewujudkan Jerman yang lebih kuat, tanpa sekali lagi memisahkan bagian yang ada.<sup>18</sup>

Masalah kesatuan internal dalam negara yang masih harus dicapai berhubungan dengan salah satu masalah kesenjangan identitas yang diangkat dalam skripsi ini. Sejauh ini, kota terbesar di Jerman bersatu, negara-kota Berlin meliputi wilayah 883 km persegi; memiliki 3,4 juta penduduk dan kemungkinan akan berkembang menjadi 5 juta dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di Berlin inilah sejarah Jerman yang signifikan, telah berakhir dan bermula. Berlin telah sekali lagi menjadi ibukota Jerman sejak 3 Oktober 1990, hari dimana re-unifikasi Jerman terjadi. Pertempuran antara Bonn dan Berlin yang berlangsung hingga Juni 1991, bukan hanya untuk memutuskan kota mana seharusnya menjadi ibukota Jerman, tetapi juga untuk memutuskan apakah pusat pemerintahan harus turut kembali ke Berlin. Situasi yang agak kacau ini adalah akibat dari kebingungan atas status Berlin selama empat puluh tahun masa pra-reunifikasi. Sebuah kota di tengah wilayah Jerman Timur, dibagi oleh Sekutu setelah perang. Setengah Berlin menjadi milik Barat. Sementara setengah lainnya menjadi bagian dari Timur. Saat Tembok Berlin telah runtuh, dan Berlin pun kembali menjadi kesatuan yang utuh. Namun pembagian dan perbedaan yang kontras selama empat puluh tahun tidak dapat dihilangkan dalam semalam di antara masyarakat kedua Berlin.<sup>19</sup>

Seperti yang ditulis Gerd Knischewski dalam artikelnya yang berjudul *Post-War National Identity in Germany*, setelah re-unifikasi terjadi, salah satu pertanyaan

<sup>18</sup> Imanuel Geiss, *The Question of German Unification 1806-1996*, (London: Routledge, 1997), hlm. 105.

<sup>19</sup> Susan Stern, *Meet United Germany: Handbook 1991/1992*, (Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, 1991), hlm. 36.

dominan yang muncul akan perdebatan tentang identitas nasional Jerman adalah: apakah Jerman baru benar-benar bersatu, atau malah sekarang terdapat dua identitas Jerman, yaitu sebagai Jerman Timur dan sebagai Jerman Barat?<sup>20</sup>

Kondisi yang tidak teratur setelah runtuhnya sistem yang telah berlangsung selama puluhan tahun adalah sesuatu yang normal, salah satu bentuknya adalah kebingungan di tengah masyarakat Jerman paska re-unifikasi. Permasalahan internal dan eksternal, tanpa dapat ditawarkan lagi, berujung pada terbelahnya masyarakat oleh ketegangan dan konflik, bertentangan dengan rasa kemenangan bersama itu sendiri. Jerman baru, yang harusnya telah bersatu, menemukan masyarakatnya tetap terpecah menjadi Barat dan Timur. Bagaimana kedua kelompok masyarakat ini akan beradaptasi satu sama lain dan menghadapi konsekuensi dari re-unifikasi. Selama empat puluh tahun, masyarakat Jerman Timur maupun Jerman Barat telah terbiasa dengan divisinya masing-masing. Sejak penyatuan, kedua kelompok ini harus menghadapi kenyataan dan keharusan untuk berbagi. Di satu sisi, tidak ada masyarakat yang dapat bertahan selama empat puluh lima tahun dari sayap Kiri kediktatoran totaliter, di bawah pemerintahan Uni Soviet, tanpa membawa rasa yang mendalam. Kedua bagian Jerman lebih terasing dari satu sama lain daripada yang diduga.<sup>21</sup>

Dalam *Democracy and Its Discontents in Post-Wall Germany*, Richard I. Hofferbert dan Hans-Dieter Klingemann menunjukkan bahwa runtuhnya Tembok Berlin, pada November 1989, telah menyatukan masyarakat Jerman Barat dan Timur dalam satu cita-cita yang sama, yaitu demokrasi. Parlemen baru dipilih oleh para pemilih dari negara yang sudah bersatu. Pertama kalinya bagi FRG, sejak berdirinya pada tahun 1949, menggunakan proses pemilihan untuk menghasilkan sebuah pemerintahan koalisi. Tidak sedikit pula pemilih di Timur malah mendukung CDU dan FDP, yang notabene sama halnya dengan mendukung keseimbangan politik yang didirikan selama 40 tahun di Jerman Barat. Memang ada perbedaan antara Barat-Timur dalam tingkat persetujuan demokrasi secara abstrak (91 vs 84 persen) dan

<sup>20</sup> Gerd Knischewski, "Post-War National Identity in Germany" dalam *Nation & Identity in Contemporary Europe*, (London: Routledge, 1996), hlm. 142.

<sup>21</sup> Geiss, *Op. Cit.*, hlm. 105-109.

dalam fungsi umum rezim (71 vs 56 persen). Tetapi pada tahun 1997, tak ada perbedaan dalam tingkat penerimaan untuk pemerintah yang berkuasa, dengan 21 persen di setiap daerah menunjukkan evaluasi yang positif. Dengan adanya persetujuan tertinggi di kedua daerah, yaitu komitmen untuk demokrasi dan kepuasan atas implementasinya, tidak ada perbedaan antara Barat-Timur. Pada akhir 1990, pemisahan formal antara bagian barat, Republik Federal Jerman (FRG), dan bagian timur, Republik Demokratik Jerman (GDR), secara konstitusional dihilangkan. Dalam setengah dekade berikutnya sudah mulai dilakukan transfer dana dari Barat ke Timur secara besar-besaran, untuk pembentukan ulang organisasi usaha ekonomi dan membangun infrastruktur modern di wilayah bekas GDR. Keputusan telah diambil dan pelaksanaan pemindahan ibukota dari Bonn ke wilayah bersejarah Berlin pun dilakukan. Meskipun menimbulkan keluhan yang luas dan keruntuhan ekonomi yang serius, secara fisik, tembok dan sisa-sisanya telah diruntuhkan. Perbedaan yang ada seakan surut karena dukungan dari kedua Jerman Barat dan Jerman Timur bagi demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan yang lebih disukai, menempati posisi teratas dari yang ditemukan di negara-negara lain di seluruh dunia. Demikian pula, tingkat kepuasan dengan rezim yang ada berada di atas normal dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga telah diuji.<sup>22</sup>

Tetapi seringkali masih ada “dinding pemisah” dalam pikiran dan mental masyarakat Jerman sendiri. Muncul ketidakpuasan untuk meninggalkan Jerman Barat dan seringkali dipertanyakan akan kondisi re-unifikasi yang menjadikan orang-orang Timur memiliki perasaan sebagai warga negara kelas dua, ditambah dengan nostalgia-nostalgia aan beberapa aspek yang lebih nyaman dari rezim yang lama. Terlebih lagi, persamaan penerimaan terhadap demokrasi ternyata tidak pula menghasilkan persamaan kekuatan politik antara partai-partai politik dari Timur dan Barat.<sup>23</sup> Susan E Scarrow, dalam tulisannya *Embracing Dealignment, Combating*

---

<sup>22</sup> Richard I. Hofferbert dan Hans-Dieter Klingemann, “Democracy and Its Discontents in Post-Wall Germany,” dalam *International Political Science Review / Revue internationale de science politique*, Vol. 22, No. 4, *The Dynamics of Democratic Satisfaction, Dynamique de la satisfaction démocratique* (Oct., 2001), pp. 363-378, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/1601212>, diakses pada 07 September 2009 pukul 10:32 WIB.

<sup>23</sup> *Ibid.*

*Realignment: German Parties Respond*, mengemukakan bahwa re-unifikasi, meskipun menandai mulainya sebuah era politik baru, nyatanya hanya menghasilkan pergeseran yang sangat kecil dalam konstelasi politik. Re-unifikasi jelas memulai sebuah era politik baru, namun dapat dikatakan bahwa integrasi sekitar 15 juta orang Jerman Timur dengan 60 juta Jerman Barat menghasilkan pergeseran yang sangat kecil dalam daftar nama partai politik. Pada tahun 1990 partai-partai Jerman Timur, yang baru didirikan atau mendirikan kembali, dengan cepat harus berusaha berorientasi kepada rekan-rekan partai Barat. Sebagian besar memilih untuk menjadi aliansi dengan segera, sebelum atau setelah tahun 1990 'Pemilu Re-unifikasi'. Partai dari Timur yang bertahan hidup adalah PDS dan penerus demokratis yang berkuasa di Jerman Timur Partai Persatuan Sosialis (SED).<sup>24</sup> PDS berhasil dalam Pemilu nasional, regional, dan lokal di kawasan timur. Dibeberani dengan warisan masa lalu, PDS telah berhasil memantapkan diri di belahan timur, sebagai partai populis yang mendapat dukungan dari beberapa tokoh pemimpin terkemuka dari oposisi GDR, sementara di Barat posisinya masih marjinal. PDS, yang merupakan organisasi penerus dari bekas Partai Persatuan Sosialis, menemukan bahwa diri mereka bersifat skeptis terhadap re-unifikasi.<sup>25</sup>

Pemilu 1990 memberikan indikasi pertama dari perluasan sistem politik dengan bersatunya kedua Jerman melalui re-unifikasi. Meskipun beberapa analisis menganggap bahwa SPD dari Timur akan bekerja dengan baik di daerah yang pernah menjadi kubu sosialis, nyatanya sangat banyak pemilih Timur malah mendukung CDU dan FDP, yaitu para pihak yang mendukung re-unifikasi agar berlangsung dengan cepat. Dukungan dari orang-orang timur ini membantu koalisi CDU / CSU / FDP untuk dapat mempertahankan koalisi nasional. Sebaliknya, SPD yang dipimpin oleh seorang yang sangat enggan mendukung re-unifikasi (Oscar Lafontaine), menerima perolehan suara terendah bagi partai sejak tahun 1957. Sebuah peristiwa yang tampaknya sangat tidak mungkin terjadi delapan belas bulan yang lalu, sebelum

<sup>24</sup> Susan E Scarrow, "Embracing Dealignment, Combating Realignment: German Parties Respond" dalam *Political Parties and Electoral Change*, (London: SAGE Publications Ltd, 2004), hlm. 87.

<sup>25</sup> Gerd Knischewski, "Post-War National Identity in Germany" dalam *Nation & Identity in Contemporary Europe*, (London: Routledge, 1996), hlm. 143-144.

re-unifikasi mengubah prioritas politik dan mengubah basis elektoral. Re-unifikasi hanya sedikit mengubah keseimbangan politik yang didirikan selama 40 tahun dari kompetisi partai di Jerman Barat. Re-unifikasi malah mempercepat beberapa kecenderungan yang sudah jelas telah terjadi di Jerman Barat.<sup>26</sup>

Kontroversi berlanjut ketika isu yang dipertanyakan tidak lagi mengenai *apakah* tetapi *bagaimana* untuk mencapai persatuan. Undang-undang Dasar dari FRG memperbolehkan, dalam artikel 23, untuk penambahan anggota baru dalam federasi, dan di dalam artikel 146, untuk re-unifikasi Jerman yang mana harus diperkuat dengan cara merancang konstitusi baru. Kelompok Kiri mendukung kemungkinan itu, seperti dalam pandangan bahwa hanya sebuah konstitusi baru yang disetujui oleh referendum yang bisa memberikan kesatuan negara-bangsa yang demokratis, sebagai legitimasi untuk negara dari semua warga negara. Jalan yang dipilih sebenarnya adalah untuk persatuan yang didasarkan pada Pasal 23 dan proses formal untuk menyelesaikan beberapa perjanjian (yaitu 'Perjanjian Ekonomi, Mata Uang dan Uni Sosial' dan kemudian 'Perjanjian Re-unifikasi'). Hal ini dikritik oleh kelompok Kiri, yang melihat hal ini akan memberikan FRG dominasi mutlak atas GDR, dan bahkan diberi label sebagai sebuah aneksasi dari FRG terhadap GDR. Dalam persepsi mayoritas orang Jerman Barat sendiri, re-unifikasi tidak menghasilkan perubahan besar selain dari kenaikan pajak, pemotongan belanja publik, dan mengulangi seruan-seruan untuk bersolidaritas dengan Jerman Timur yang segera membuat mereka bosan.<sup>27</sup>

Maka hal yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengenai apakah Jerman sebaiknya beraspirasi menjadi satu-negara-bangsa dan segera menghilangkan polarisasi elit budaya di Jerman timur dan Jerman barat. Para pendukung negara kesatuan, berpendapat bahwa rakyat dan budaya Jerman tetap utuh dan sekarang sudah kembali memiliki kesempatan untuk berkembang. Namun banyak pengamat menganggap keinginan Jerman Timur untuk 'cepat mencapai tingkat kesejahteraan dan konsumsi sebanding dengan Jerman Barat' sebagai motivasi utama di balik

<sup>26</sup> Scarrow, *Op. Cit.*, hlm. 87-89.

<sup>27</sup> Knischewski, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

keinginan untuk menyatukan kembali kedua Jerman. Keinginan ini dilihat oleh banyak cendekiawan Jerman Timur sebagai sebuah pengkhianatan terhadap hak reformasi GDR itu sendiri, dimana Timur harus tetap berpedoman terhadap model dari Barat. Oleh karena itu, terdapat keinginan untuk terbentuknya sebuah konfederasi dari kedua negara Jerman (Timur dan Barat) dimana kedua negara tersebut, masing-masing, dapat berkembang secara independen. Adanya harapan akan sebuah reformasi sosialisme atau sintesis dari sebuah 'jalan ketiga' antara kapitalisme dan sosialisme.

Namun Günter Grass, seorang penulis yang terkenal dari Jerman Barat, menolak negara-bangsa bersatu untuk alasan historis. Sebagian besar dari golongan Kiri Jerman Barat, yang menganggap dirinya sebagai 'masyarakat Eropa post-nasional' berargumen bahwa negara-bangsa yang terbentuk ini tidak bekerja dengan baik secara fungsional. Pendapat ini disuarakan antara lain oleh politisi SPD, Oscar Lafontaine, yang kemudian menantang Helmut Kohl untuk menjabat sebagai Kanselir Jerman dalam pemilu pertama Jerman bersatu pada tahun 1990.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, sebuah populasi yang memiliki keragaman di dalamnya dapat pula diterima untuk memiliki nilai-nilai dan norma-norma politik yang beragam, namun juga memiliki kesamaan bersama tertentu yang membentuk dasar dari suatu budaya politik bangsa. Pemerintah Jerman Barat, semasa sesudah perang, berusaha untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan norma-norma ya ada menjadi sesuai dengan komitmen untuk sistem demokrasi baru. Selama awal tahun, komitmen sangat minim dari FRG karena penduduk lebih peduli dengan perjuangan eksistensi sehari-hari. Bertanggung jawab atas perang yang agresif dan untuk *Holocaust*, dan merasa bersalah karena telah mendukung suatu rezim Nazi yang membawa bencana kepada diri sendiri dan orang lain, beberapa golongan orang bahkan menjadi enggan untuk mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Jerman. Pejabat sekutu dan kemudian elit politik Jerman membangun sebuah tatanan politik demokratis, yang memang diterima warga, tetapi sering kali dengan sedikit antusiasme. Dengan demikian, pada tahun 1949, sekitar setengah dari responden dalam jajak pendapat umum masih sependapat

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 142-143.

dengan proposisi bahwa "Sosialisme Nasional merupakan ide yang bagus, namun hanya dilakukan dengan buruk." Masyarakat lebih suka agar pemerintah menghasilkan kesuksesan ekonomi dan keamanan daripada menjamin kebebasan politik. Pada awal tahun 1950-an, hanya sekitar seperempat dari responden menyatakan tertarik dalam soal politik; beberapa mendiskusikan politik dengan keluarga atau teman. Jika krisis ekonomi besar terus terjadi, mungkin mayoritas masyarakat tidak akan mendukung pemerintahan yang demokratis.<sup>29</sup>

Faktor yang menentukan dalam kesenjangan antara Timur dan Barat ini adalah faktor ekonomi antara barat dan Timur, serta konsekuensi psikologis, sosial dan politiknya. Proses transformasi ekonomi, sosial, hukum, budaya dan politik yang asimetris setelah re-unifikasi telah meninggalkan jejak yang berbeda di wilayah timur dan barat. Setelah re-unifikasi, dapat terlihat bahwa kekuatan per kapita ekonomi dan produktivitas di Jerman Timur hanyalah sekitar sepertiga dari tingkat yang dicapai di Jerman Barat.<sup>30</sup> Memang perkembangan ekonomi di Jerman telah menjadi sangat terbagi sejak re-unifikasi. Sementara Jerman Barat menikmati pertumbuhan yang kuat, produksi di kawasan Jerman timur malah menurun tajam.<sup>31</sup>

Telah ada beberapa perubahan positif, seperti pengerjaan perbaikan (bekas) Berlin Timur telah diadakan secara besar-besaran dan dengan menarik: tidak hanya daerah pemukiman dan tempat-tempat bersejarah, ada ketertarikan dari arsitek internasional untuk datang dengan rencana terbaik untuk memanfaatkan ruang-ruang yang ada.<sup>32</sup> Namun tetap saja Jerman Timur lah yang paling utama harus berubah, menyesuaikan, memperkirakan lagi dan 'menanggung derita' atas perubahan sistem dalam negara paska re-unifikasi.

Juga masalah pengangguran, yang tidak terjadi di GDR tetapi sekarang sudah mencapai puncaknya hingga 30 persen (termasuk pengangguran tersembunyi),

---

<sup>29</sup> Gerard Braunthal, "From Bonn Republic to Berlin Republic" dalam *European Politics in The Age of Globalization*, (Orlando: Harcourt College Publishers, 2001), hlm. 151.

<sup>30</sup> Imanuel Geiss, *The Question of German Unification 1806-1996*, (London: Routledge, 1997), hlm. 109.

<sup>31</sup> Susan Stern, *Meet United Germany: Handbook 1991/1992*, (Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH), 1991, hlm. 69.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

terutama di Jerman Timur. Angka kelahiran yang menurun dengan cepat di Jerman Timur sejak re-unifikasi menunjuk pada besarnya ketidakpastian sosial dan ketakutan akan masa depan.<sup>33</sup> Masalah pengangguran-setengah (kelompok pengangguran dan orang-orang yang bekerja dalam waktu yang pendek) yang meluas adalah yang masalah sosial yang paling mencolok ditimbulkan oleh perubahan struktural: pergantian sistem ekonomi sentral kepada pasar ekonomi. Ketidakpastian prospek di pasar kerja pun membawa kemerosotan jumlah penduduk.<sup>34</sup> Tingkat pengangguran yang relatif tinggi ini telah memotong jauh ke dalam anggaran pemerintah Federal.<sup>35</sup>

Melalui bersatunya Negara Jerman Barat dan Jerman Timur, di samping sistem ekonomi dan sistem undang-undang dan mata uang *Deutsche Mark*, sistem jaminan sosial di Jerman Barat juga diterapkan di Jerman Timur. Setelah sepuluh tahun penyatuan Jerman, harus disimpulkan bahwa masih terdapat celah yang besar di antara pengeluaran dana bagi negara-negara bagian yang baru dan prestasi yang mereka sumbangkan meskipun terdapat tingkat pertumbuhan yang tinggi (masyarakat Jerman Timur menghasilkan 12% produksi sosial, ditahun 1991 hanya terdapat 7%). Selain dari itu, penyatuan Jerman yang didasarkan kepada keputusan politik pemerintahan yang lama lebih banyak dibiayai melalui hutang negara dan kenaikan iuran asuransi wajib dibandingkan dengan kenaikan pajak. Meskipun sudah berjalannya proses pemulihan ekonomi di Negara-negara bagian yang baru, mantan Jerman Timur masih tergantung dari dana bantuan dan investasi langsung dari Jerman Barat.<sup>36</sup>

Tekanan dari proses transformasi ini diterjemahkan oleh beberapa orang sebagai nostalgia untuk GDR, yang bertransfigurasi menjadi positif. Sebagian identitas Jerman Timur yang spesifik, mengekspresikan diri dalam perubahan perilaku konsumen yang lebih dan lebih banyak beralih untuk memproduksi dan untuk produk yang familiar dari masa GDR. Dalam beberapa survei, sejumlah orang

<sup>33</sup> Gerd Knischewski, "Post-War National Identity in Germany" dalam *Nation & Identity in Contemporary Europe*, (London: Routledge, 1996), hlm. 144.

<sup>34</sup> Gerd Botterweck, *Sosial Politik dan Jaminan Sosial dalam Pasar Ekonomi Sosial*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2001), hlm. 30-31.

<sup>35</sup> Stern, *Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>36</sup> Botterweck, *Op. Cit.*, hlm. 30-31.



Jerman Timur yang mendefinisikan diri mereka sebagai (bekas) Jerman Timur atau (bekas) GDR, daripada sebagai warga negara Jerman (secara keseluruhan setelah re-unifikasi), telah tumbuh.<sup>37</sup>

Sedangkan secara psikologis, pemahaman sejarah yang berbeda juga berkontribusi terhadap konflik antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Secara psikologis, kebanyakan orang Jerman Timur menemukan diri mereka dalam posisi defensif yang permanent seiring dengan masyarakat Jerman Barat yang berperilaku merendahkan posisi orang-orang Timur dalam negara. Debat publik pada saat itu berfokus pada perbedaan daripada kesamaan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Selama beberapa dekade terakhir, budaya politik dan mentalitas telah tumbuh menjadi terpisah. Jerman Barat dibentuk mengikuti nilai-nilai liberal, yaitu model demokrasi Barat yang menghargai kemampuan kritis individu, sementara itu di Jerman Timur nilai-nilai otoriter telah menang. Dengan demikian Jerman Timur dihadapkan dengan (dan satu-satunya cara) proses penyesuaian yang panjang untuk dapat 'membawa mereka ke tingkat Barat'. Jika identitas nasional didefinisikan sebagai suatu sistem (secara sadar) nilai-nilai dan keyakinan (politik) bersama, seperti sistem-nilai umum, maka keberadaannya hanya dapat diasumsikan secara sangat terbatas setelah pembagian selama empat puluh tahun.<sup>38</sup>

Perpecahan yang tajam telah berlangsung secara kultural dalam masyarakat kedua wilayah. Sebelum re-unifikasi, mereka mengaku sebagai yang 'bersatu meskipun dibagi' ( '*Spaltung in der Einheit*' ), sedangkan sekarang mereka malah terancam untuk menjadi 'dibagi dengan persatuan' ( '*Spaltung durch die Einheit*' ). Hal ini mengacu kepada apa yang disebut 'dinding di dalam kepala' ( '*Mauer in den Köpfen*' ), yaitu 'dinding' psikologis yang telah menggantikan dinding fisik Berlin, yang terbelah dua selama lebih dari dua puluh delapan tahun. Jerman Timur merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua oleh Jerman Barat yang arogan, yang disebut '*Basserwessis*' (*Basserwisser* dan *Wessis* adalah istilah, dari orang-orang Jerman timur, bagi orang-orang yang berasal dari Jerman barat). Sebagai

---

<sup>37</sup> Knischewski, *Op. Cit.*, hlm. 144.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

penentangannya, Jerman Barat menggambarkan Jerman Timur sebagai *Jammerosis* (Timur yang merengek).<sup>39</sup>

Arogansi yang luas muncul dari masyarakat Jerman Barat, yang berpikir mereka tahu lebih baik, sesuai dengan reaksi hipersensitif yang banyak dikeluarkan oleh *Ossis* akibat kehilangan identitas GDR mereka. Sementara di sisi lain, banyak orang Jerman Barat bertindak seolah-olah mereka menyalahkan orang Jerman Timur karena mengulur waktu begitu lama, atau bahkan hanya karena (pernah) tinggal di GDR. Banyak orang di Jerman Timur memberi kesan bahwa Jerman Barat bahkan tidak berhak untuk berbicara tentang GDR. Mereka pun menjadi peka terhadap segala sesuatu dari kawasan barat, seperti kritik terhadap karakter totaliter GDR, dan menjadi terlalu banyak tersinggung, ketika pandangan seperti itu benar-benar hanya diarahkan pada struktur politik kolektif. Tidak jarang orang Jerman Barat melontarkan kebencian dan tuduhan terhadap Jerman Timur, termasuk masalah biaya pembangunan kembali Jerman Timur yang (mereka anggap) sangat besar dan memberatkan. Muncul pula tuduhan tandingan dari timur dalam jumlah yang mengejutkan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah luka subyektif dari kondisi yang kusut di antara mereka. Kedua masyarakat di Jerman timur dan barat telah dibawa ke satu kondisi negatif dengan terbentuknya 'dinding baru' di kepala dan hati mereka masing-masing.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 143-144.

<sup>40</sup> Imanuel Geiss, *The Question of German Unification 1806-1996*, (London: Routledge, 1997), hlm. 110-112.

## BAB 3

### PEMILIHAN UMUM REPUBLIK FEDERAL JERMAN TAHUN 2005

#### 3.1 Gambaran Umum Pemilu *Bundestag* Republik Federal Jerman tahun 2005

##### 3.1.1 Latar Belakang Munculnya Pemilu Dini tahun 2005

Pada 18 September 2005 diselenggarakan Pemilu legislatif di mana warga Jerman dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan sebuah pemerintahan yang baru. Dalam Pemilu terjadi persaingan ketat antar partai politik untuk dapat meraih mayoritas kursi di *Bundestag*.<sup>1</sup> Pemilu diselenggarakan dengan menggunakan sistem Elektoral, yaitu setiap pemilih memiliki dua suara. Suara pertama adalah untuk memilih politisi dari konstituen tertentu. Dengan cara ini pemilih dapat memilih sekitar separuh dari keseluruhan kursi yang diperebutkan di parlemen. Sedangkan suara kedua diberikan kepada partai untuk mengisi sisa kursi. Masa jabatan anggota legislatif di Jerman ialah 4 tahun, sehingga pemilu juga diadakan setiap 4 tahun.<sup>2</sup>

Berdasarkan periode ini, Pemilu selanjutnya setelah tahun 2002 seharusnya diadakan pada September 2006. Sehingga pengumuman dari Kanselir Gerhard Schröder untuk membubarkan *Bundestag* lebih awal pada tahun 2005, membuat sebagian besar menteri kabinet dan rekan-rekan senior partai, terkejut. Schröder mengeluarkan keputusan ini pada malam hari setelah pemilihan negara bagian di North Rhine-Westphalia, pada tanggal 22 Mei 2005, yang menghasilkan kekalahan Sosial Demokrat dan mengakhiri masa pemerintahan-negara *Red-Green*, SPD-Partai Hijau. Motif Schröder untuk memajukan Pemilu ini tidak diketahui. Penjelasan yang kemudian diumumkan Schröder, terpusat pada keinginannya akan sebuah mandat pemilihan baru, yang akan memungkinkannya untuk melanjutkan kebijakan reformasi pemerintah. Argumen lain, terkait pada fokus akan kemungkinan mengatasi keadaan "pemerintah yang terbagi." Argumen terakhir ini gagal meyakinkan banyak orang, karena bahkan mandat pemilu yang terkuat yang mungkin terjadi bagi koalisi Merah-

<sup>1</sup> Myrna Ratna, "Jerman Memilih: CDU dan SPD Bersaing Ketat," *Kompas*, 19 September 2005, hlm. 11.

<sup>2</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, "Seputar Pemilu Legislatif Jerman 2005," ('s-Gravenhage, 23 September 2005) diperoleh dari <http://indocase.nl> diakses pada 14 September 2009 pukul 11.03 WIB.

Hijau tidak akan mengakhiri masa “pemerintahan yang terbagi.” Persoalan makna dari diselenggarakannya pemilu *Bundestag* yang lebih awal ini menjadi isu yang mencolok. Berbeda dengan perdana menteri Inggris, Kanselir Jerman tidak bebas untuk membubarkan parlemen dan tidak dapat mengadakan Pemilu kapanpun yang dianggap tepat. *Bundestag* Jerman juga tidak memiliki hak untuk mengakhiri tugas legislatifnya lebih awal dengan mengesahkan sebuah resolusi pembubaran diri. Keputusan akhir tentang isu-isu ini dibuat oleh Presiden Federal. Namun, Presiden dapat bertindak hanya setelah Kanselir telah kehilangan suara kepercayaan di *Bundestag*, sesuai dengan prosedur khusus yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Dasar Negara Republik Federal Jerman.<sup>3</sup>

Akan tetapi, gagasan Schröder ini mendapat dukungan dari semua partai politik yang relevan. Dalam praktek konstitusionalnya pun, Pasal 68 telah berangsur berubah menjadi setara dengan pembubaran diri parlemen secara fungsional, khususnya pada proses Oktober 1982 ketika Kanselir Helmut Kohl, meskipun memimpin mayoritas parlemen yang sehat, berhasil mendorong untuk diadakannya Pemilu dini. Sebangun dengan ini, Schröder berhasil menghasilkan hal yang sama. Dalam pemilihan *Bundestag* pada tanggal 1 Juli 2005, sebagian besar anggota dari partai-partai koalisi memberi dukungan dalam rangka untuk membantu masa legislatif berakhir awal. Dengan dukungan suara bulat hampir dari semua pihak yang relevan untuk pemilihan awal, Presiden Kohler tidak memiliki pilihan lain selain membubarkan *Bundestag* ke-15 tiga minggu kemudian, dan pemilihan parlemen dijadwalkan 18 September 2005. Hal ini merupakan lampu hijau bagi pemilihan umum dini untuk *Bundestag* ke-16, jatuh pada tanggal 25 Agustus, dari Mahkamah Konstitusi Jerman, yang sebelumnya telah memberhentikan keluhan dari dua anggota parlemen, yang merasa bahwa hak-hak mereka telah dilanggar oleh proses 1 Juli 2005. Para pengamat, secara luas, menganggap insiden itu untuk menandai dimulainya suatu hak prerogatif *de facto* sang Kanselir untuk membubarkan

---

<sup>3</sup> Ludger Helms, “Germany's Crisis and Struggle for Political Self-Reinvention: The 2005 Federal Election in Context” dalam *German Studies Review*, Vol. 29, No. 2 (2006), 315-330, hlm. 321, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/27668037> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 15.30 WIB.

Bundestag dan memajukan Pemilu setiap kapanpun diinginkan. Meskipun hal ini tidak cukup sesuai dengan tesis modern akan “Presidensialisasi” yang mendominasi debat ilmiah tentang perubahan kepemimpinan politik di Eropa Barat, hal ini diakui oleh banyak orang untuk membentuk sebuah komponen struktural lebih lanjut dari apa yang telah dikenal sebagai “Demokrasi Kanselir Jerman.”<sup>4</sup>

Pemilu tahun 2005 pun digelar dengan persaingan politik di dalamnya. Persaingan yang dimaksud kemudian menjadi persaingan yang dipimpin oleh dua partai terbesar di Jerman, yang otomatis diikuti dengan persaingan antara Gerhard Schröder, Kanselir Jerman *incumbent* (masih menjabat pada saat itu) dari Partai Sosial Demokrat SPD dan penantanginya, Angela Merkel, kandidat Kanselir dari partai Kristen Demokrat CDU/CSU.

Media sepenuhnya menyajikan kampanye Pemilu sebagai duel antara dua pesaing tersebut untuk jabatan Kanselir: *incumbent* Gerhard Schröder (SPD) dan Angela Merkel, yang adalah kandidat Kanselir perempuan pertama dalam sejarah Jerman dan yang pertama dari *Länder* baru. Seperti pada tahun 2002, kegiatan kampanye mengandung pertikaian acara televisi pada waktu-waktu premium (yang paling banyak ditonton masyarakat) antara Kanselir dan kandidat oposisi, yang dilakukan untuk menarik sejumlah ketertarikan publik. Namun, data jajak pendapat menunjukkan tesis “personalisasi” populer yang kontras. Menurut golongan pemilih, yang fokus pada pemimpin individual daripada kepada partai politik, hanya 19 persen pemilih menganggap pertanyaan tentang Kanselir adalah lebih penting daripada komposisi partai pada pemerintahan, dibandingkan 72 persen memiliki pandangan yang berbeda.<sup>5</sup>

### 3.1.2 Sistem Pemilu Republik Federal Jerman

Di Jerman, asas pemilu terdiri dari langsung, umum, bebas, setara, dan rahasia. Menurut Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Dasar Jerman, ‘umum’ berarti seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak pilih; ‘langsung’

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 321-322.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 323.

bermakna bahwa pemilih memilih langsung anggota legislatif mereka; ‘bebas’ berarti pemilih bebas dari tekanan siapa pun dalam menentukan pilihannya; ‘setara’ artinya setiap suara memiliki bobot yang sama; dan ‘rahasia’ maksudnya tidak seorang pun boleh tahu calon yang dipilih oleh seseorang kecuali yang bersangkutan mengungkapkannya atas kemauan sendiri.<sup>6</sup> Warga Jerman berusia 18 tahun keatas berhak untuk memilih selama mereka tinggal di negara Jerman selama minimal tiga bulan atau bagi mereka yang setidaknya telah menjadi warga negara Jerman selama satu tahun. Secara umum, tingkat partisipasi pemilih di Jerman cenderung tinggi. Dalam pemilihan 2005, 77,7 persen (sekitar 61,6 juta) warga berhak memberikan suara mereka.<sup>7</sup>

Sistem yang berlaku adalah satu orang pemilih dengan sistem suara ganda. Setiap warga Jerman yang ikut Pemilu diperbolehkan untuk menggunakan dua suara: yang pertama untuk konstituen mereka dan yang kedua untuk daftar dari partai politik, yang dapat memuat 10 sampai 30 kandidat.<sup>8</sup> Dengan kata lain, suara pertama adalah untuk memilih politisi dari konstituen tertentu. Dengan cara ini mereka memilih sekitar separuh dari keseluruhan kursi yang diperebutkan di parlemen. Sedangkan suara kedua diberikan kepada partai untuk mengisi sisa kursi.<sup>9</sup> Sistem ini seringkali merujuk pada “representasi personal proporsional” karena penyusunan parlemen ditentukan baik oleh kandidat langsung maupun oleh partai politik, yang mana dipilih untuk basis (dasar) partainya daripada untuk kandidatnya. Suara pertama, yang mana untuk kandidat langsung berjalan di setiap 299 distrik (daerah pemilihan) di Jerman, yang menentukan setengah dari total komposisi parlemen, sehingga memastikan bahwa setiap distrik terwakilkan. Suara kedua menentukan mayoritas di *Bundestag*. Proporsi keseluruhan kertas suara yang masing-masing

<sup>6</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, “Seputar Pemilu Legislatif Jerman 2005,” (‘s-Gravenhage, 23 September 2005) diperoleh dari <http://indocase.nl> diakses pada 14 September 2009 pukul 11.03 WIB.

<sup>7</sup> Win, “Don’t USEA dummy’s guide to German elections,” (DW-world.de : Deutsche Welle), diperoleh dari <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,607872,00.html>, diakses pada 28 April 2009, pukul 14.02 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, *Loc. Cit.*

partai politik dapatkan, dalam pemungutan suara kedua, menentukan berapa banyak kandidat dari daftar negara yang akan diberikan kursi di *Bundestag*.

Secara historis, suara pertama dan kedua hampir selalu identik secara proporsional, tapi ada saat-saat ketika partai politik cenderung mendapatkan suara lebih besar dalam *Erststimme* (suara pertama-untuk anggota-anggota distrik tunggal) dibandingkan pada *Zweitstimme* (suara proporsional nasional).<sup>10</sup> Dalam hal demikian, partai dapat tetap bergantung pada perolehan kursi dari pemungutan suara pertama.<sup>11</sup> Karena pada *Erststimme*, pemilih tidak ingin menyia-nyiakan suara mereka pada kandidat yang tidak memiliki kesempatan. Selanjutnya dalam *Zweitstimme*, pemilih mengarahkan suara mereka untuk kebijakan mana yang mereka inginkan untuk diproses lebih lanjut.<sup>12</sup> Suara kedua ini menjadi krusial untuk distribusi kursi di parlemen, seperti mandat langsung yang diperhitungkan. *Electoral threshold* yang ditentukan cukup tinggi, yaitu sebesar 5 %. Hanya partai politik yang memenangkan 5% suara atau tiga mandat langsung yang dapat memperoleh kursi di parlemen, membuatnya menjadi suara yang proporsional dengan ketentuan persentase minimum.<sup>13</sup>

Terdapat 598 kursi pada parlemen Jerman.<sup>14</sup> Kursi dipertarungkan melalui representasi proporsional dengan menggunakan daftar urut calon anggota legislatif. Pada prinsipnya syarat keterwakilan di parlemen adalah dengan meraih minimum 5% suara, atau 3 kursi.<sup>15</sup> Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Jerman, partai politik harus mendapatkan minimum 5 persen suara kedua untuk dapat memenangkan kursi di *Bundestag*. Hukum ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953, karena ketidakstabilan disebabkan oleh kebutuhan untuk koalisi multi-partai di Republik

<sup>10</sup> Thomas Meyer dan Nicole Breyer, *The Future of Social Democracy*, (New Delhi: Samskriti, 2007), hlm. 210.

<sup>11</sup> Win, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Michael Barone, "Germany's election results point to a big win for the center-right" dalam *Beltway Confidential The Examiner* (2009), diperoleh dari <http://www.washingtonexaminer.com/opinion/blogs/beltway-confidential/Germanys-election-is-a-big-win-for-the-center-right-merkel-christian-democrats-greens-left-fdp.html>, diakses pada 28 September 2009 pukul 14.05 WIB.

<sup>13</sup> Thomas Meyer dan Nicole Breyer, *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Barone, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, *Loc. Cit.*

Weimar. Dimaksudkan untuk mencegah partai politik pecahan (kecil) memasuki parlemen. Dalam beberapa tahun terakhir, UU ini telah menjaga *Bundestag* dari partai-partai politik ekstrim-Kanan dan partai-partai politik ekstrimis seperti Partai Nasional Demokratik (*National Democratic Party*). Namun, pengecualian diberikan bagi partai politik yang memenangkan kandidatnya setidaknya di tiga daerah pemilihan atau untuk kandidat yang diakui oleh minoritas Jerman, seperti Danish di Schleswig-Holstein atau Sorbs di Saxony.<sup>16</sup>

Jika partai politik berhasil mengumpulkan 50 persen kursi di pemerintahan, ia kemudian akan secara efektif memiliki cukup suara untuk menetapkan agendanya sendiri. Namun dalam sistem parlemen yang terfragmentasi -setidaknya dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat di mana ada dua pihak mendominasi- hal ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, partai politik di Jerman biasanya perlu menciptakan hubungan kemitraan dengan satu atau lebih pihak dalam rangka membangun koalisi, sehingga memiliki suara yang cukup untuk mengendalikan *Bundestag*. Secara tradisional, kandidat dari partai yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi Kanselir dan kandidat utama dari mitra koalisi junior-sering ditarik untuk menjadi menteri luar negeri. Setelah hasil Pemilu sudah mencapai final, parlemen memiliki 14 hari untuk memilih Kanselir secara resmi. Dalam keadaan normal, Pemilu akan terjadi lagi empat tahun kemudian, dan kemudian kembali ke titik awal.

### **3.1.3 Sistem Kepartaian Republik Federal Jerman: Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2005**

Dari seluruh negara-negara demokratis-liberal di Eropa, Jerman adalah negara yang dipandang paling konsisten dalam usahanya untuk menginstitutionalisasi partai politik secara legal dalam negara. Hal ini bukan hanya direfleksikan dalam Undang-Undang Dasar Negara, namun juga di dalam partai politik itu sendiri dan di dalam

---

<sup>16</sup> Win, "Don't USEA dummy's guide to German elections," (DW-world.de : Deutsche Welle), diperoleh dari <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,607872,00.html>, diakses pada 28 April 2009, pukul 14.02 WIB.



Undang-undang Pemilu.<sup>17</sup> Dalam konteks politik Jerman kontemporer, 6 partai politik yang terkemuka dapat dilihat sebagai berikut: SPD, FDP, *Die Grünen*, CDU, CSU, dan PDS + *Die Linke*.<sup>18</sup>

Dari ke-enam partai politik ini, sistem kepartaian di Jerman terbagi menjadi dua partai utama. Partai besar pertama adalah CDU, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristen demokrat dan Neo-liberal. CDU beraliansi dengan partai politik lokal di Bavaria, CSU. Meskipun masing-masing pihak mempertahankan struktur sendiri, namun mereka membentuk koalisi di parlemen dan menjalankan kampanye bersama-sama. CDU-CSU memiliki pengikut di kalangan Katolik, Protestan, kelompok kepentingan pedesaan, dan anggota dari semua kelas ekonomi. Kekuatan politik ini umumnya bersikap konservatif pada kebijakan ekonomi dan sosial, serta lebih diidentifikasi dengan gereja Katolik Roma dan Protestan. Partai besar kedua adalah SPD, yang merupakan salah satu partai politik yang terorganisir tertua di dunia. SPD awalnya mendukung prinsip-prinsip Marxis, tetapi dalam Program Godesberg 1959 meninggalkan konsep partai "kelas" sambil terus lebih memfokuskan diri pada program kesejahteraan sosial. Di bawah kepemimpinan Gerhard Schröder, pemerintahan SPD-Hijau pada tahun 2002, dilaksanakan Agenda reformasi sentris 2010, yang dirancang untuk memodernisasi sistem sosial negara dan pasar tenaga kerja. SPD memiliki dasar yang kuat di kota-kota besar dan negara-negara bagian industri.<sup>19</sup>

Sementara itu partai-partai lain berada dalam lingkaran kekuatan kedua. FDP, cenderung lebih neo-liberal, secara tradisional terutama terdiri dari kelas menengah dan atas kaum Protestan yang menganggap dirinya ahli waris tradisi liberal Eropa. Mendukung perdagangan bebas dan mengurangi peran negara dalam kebijakan

---

<sup>17</sup> Ludger Helms, "Germany's Crisis and Struggle for Political Self-Reinvention: The 2005 Federal Election in Context" dalam *German Studies Review*, Vol. 29, No. 2 (2006), 315-330, hlm. 321, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/27668037> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 15.30 WIB.

<sup>18</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Adam S. Posen, "Germany: Getting Better All the Time" dalam *Op-ed in The International Economy* (September 16, 2003), diperoleh dari <http://www.petersoninstitute.org/publications/opeds/print.cfm?researchid=789&doc=pub> diakses pada 11 Juli 23.34 WIB.

ekonomi dan bersikap libertarian terhadap isu-isu sosial. Aliansi 90/*The Greens* (Partai Hijau) yang pada akhir 1970-an, politik lingkungan terorganisir sebagai *The Greens*. Menentang tenaga nuklir, kekuatan militer, dan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sangat industri merupakan isu kampanye utama. Pada pemilu 1990, Partai Hijau bergabung dengan Aliansi Jerman Timur '90, pengelompokan longgar dari aktivis hak-hak sipil dengan pandangan politik yang beragam. Partai Hijau bergabung dengan pemerintah Federal untuk pertama kalinya pada tahun 1998, membentuk koalisi dengan SPD. Dan PDS (sebagian besar terdiri dari mantan komunis Jerman Timur) dan WASG (*Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit/Electoral Alternative for Work and Social Justice*) partai kecil yang terdiri dari kaum kiri Barat dibuat oleh mantan Sosial Demokrat sebagai protes terhadap “agenda reformasi 2010” pemerintah)<sup>20</sup> bergabung pada Juni 2007 untuk membentuk sebuah aliansi elektoral sayap-kiri yang radikal dikenal sebagai "*The Left*" (*Die Linke*).

Lebih tepatnya, kandidat dari WASG ditempatkan pada daftar regional dari PDS yang jauh lebih mapan, yang mengubah namanya menjadi "*The Left*" dan kedua belah pihak sepakat untuk membentuk kelompok parlemen umum di Bundestag. Kebijakan luar negeri partai sebagian besar dibentuk oleh oposisi kaku untuk penempatan militer asing. Pada kebijakan domestik, partai menentang reformasi ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pasar bebas dan mengurangi tunjangan pengangguran. *The Left* mengusulkan untuk menggantikan sistem pasar bebas dengan kembali ke prinsip-prinsip sosialis. Aliansi ini menerima banyak perhatian media. Namun sebagai radikal Kiri, membuat jelas dari awal, bahwa *The Left* menganggap dirinya sendiri sebagai oposisi fundamentalis yang tidak mau bergabung dalam koalisi pemerintahan manapun, garis persaingan nyata terlihat antara dua partai besar dan calon mitra junior koalisi mereka. Dengan kata lain, sistem kepartaian paska-reunifikasi Jerman telah menjadi sistem "dua-blok," di mana dua partai "borjuis" (CDU / CSU dan FDP ) dan dua partai kiri-tengah (SPD dan Hijau) yang kira-kira memiliki kekuatan yang sama.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Helms, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dalam Negara-negara Federal baru, sistem-tiga-partai sekarang ini muncul dengan PDS membentuk sebuah kekuatan ketiga yang kuat.<sup>22</sup> Dan kampanye sebagian besar terjadi dalam pola-pola dasar kompetisi antar partai ini. Dengan begini, bipolarisme dalam sistem partai paska-reunifikasi ini telah sempurna. Kesenjangan antara dua "kubu" tidaklah sedemikian besar. Sebagai sebagian akibat dari ini, kerja sama "intra-blok" juga tetap menjadi lebih terbatas. Sebuah pembatasan kedua pada bipolar *Vallemande* berkaitan dengan keberadaan partai kelima, pos komunis, yang telah diwakili dalam setiap Bundestag dipilih sejak penyatuan Jerman tetapi tetap berada di luar busur "konstitusional." Keberadaan kekuatan ketiga, *The Left*, menjadi unsur terpenting dari perubahan struktural ini.<sup>23</sup>

### **3.2 Isu yang Berkembang pada masa Pemilu Jerman tahun 2005**

#### **3.2.1 Angela Merkel dan Pemilu Republik Federal Jerman tahun 2005**

Angela Merkel bergabung dengan CDU (*Christian Democratic Union*) pada tahun 1990.<sup>24</sup> Kemudian ia terpilih sebagai Menteri Urusan Wanita dan Pemuda (1991) dan Menteri Urusan Lingkungan (1994) pada masa pemerintahan Kanselir Helmut Kohl (1982-1998).<sup>25</sup> Tahun 2000 Angela Merkel berhasil menjadi ketua CDU.<sup>26</sup>

Merkel, seorang perempuan dan seorang Jerman Timur, melewati proses tersendiri dalam keberhasilannya untuk menjadi pemimpin CDU. Pada pergantian abad ke-21, CDU harus menghadapi krisis terburuk sejak awal pembentukannya pada tahun 1945. Beberapa hari sebelum pengumuman tentang Merkel dipublikasikan, mantan Kanselir Helmut Kohl, orang yang telah memimpin dan mendominasi CDU selama tahun 1973 sampai 1998, telah mempublikasi pengakuan bahwa ia menerima donasi finansial yang ilegal untuk CDU. Dengan begitu, CDU

<sup>22</sup> Thomas Meyer dan Nicole Breyer, *The Future of Social Democracy*, (New Delhi: Samskriti, 2007), hlm. 210.

<sup>23</sup> Helms, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Edith Koesoemawiria, "Pemilu Jerman: Potret Kanselir Jerman Angela Merkel," (2009), diperoleh dari <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4603377,00.html>, diakses pada 06 September 2009 pukul 14.16 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Aknolt Kristian Pakpahan, "Jerman di Bawah Angela Merkel", *Kompas*, 13 Oktober 2005, hlm. 6.

bukan hanya harus menghadapi konsekuensi legal (yang kemudian didenda lebih dari 40 juta euro), namun juga harus siap kehilangan aset partai yang sangat penting yaitu kredibilitas partai. Beberapa pendapat mengatakan bahwa saat itu, eksistensi CDU sedang berada dalam kondisi yang sangat membahayakan.<sup>27</sup>

Pada saat CDU dalam kondisi membingungkan ini, tidak ada satupun, baik Wolfgang Schauble yang merupakan rekan terdekat Kohl maupun anggota penting partai yang lain, yang dapat dengan yakin mensymbolisasi awal baru bagi CDU. Mereka semua adalah bagian dari apa yang disebut dengan “sistem Kohl”. Hanya ada Angela Merkel, seorang yang tidak konvensional dari Jerman Timur dan kemudian menjadi sekretaris umum CDU, yang berani membuat keputusan dan membayangkan jalan keluar dari masalah yang ada. Setelah berkonsultasi dengan beberapa orang kepercayaan, Merkel memutuskan untuk mengumumkan perihal pengajuan dirinya tanpa memberitahukan ketua partainya terlebih dahulu. Pada tahun 1999, Merkel menuntut agar diakhirinya “era Kohl” dan mendesak CDU untuk tetap berjalan terus ke depan. Segera setelah perihal tersebut diumumkan, Wolfgang Schauble juga dituduh telah menerima uang dan dijauhkan dari kesempatan untuk dipilih kembali sebagai ketua CDU. Maka Merkel pun menggantikannya pada April 2000 dengan menerima 96 persen suara dalam konvensi partai. Merkel adalah perempuan pertama yang pernah memimpin CDU, pertama yang berasal dari Jerman Timur, pertama dengan gelar dari ilmu alam, pertama yang sudah bercerai, namun bukan protestan yang pertama. Pendahulunya adalah seorang protestan juga.<sup>28</sup>

Tertanggal 2 November 2005, acara pelantikan Angela Merkel sebagai Kanselir baru Jerman diselenggarakan.<sup>29</sup> Dari perspektif ekonomi, salah satu agenda politik Merkel adalah mengurangi angka pengangguran di Jerman yang mencapai 9,57 juta tahun 2005 serta penurunan *Gross National Product* (GNP) dari 26.570 dollar AS (1998) menjadi 25.270 dollar AS (2005). Merkel sadar, kekuatan ekonomi

<sup>27</sup> Werner Reutter, “Who's Afraid of Angela Merkel?: The Life, Political Career, and Future of the New German Chancellor” dalam *International Journal*, Vol. 61, No. 1, Turkey: *Myths and Realities*, Canadian International Council (2005/2006), hlm. 215, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/40204139> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 16.02 WIB.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>29</sup> Koesoemawiria, *loc. Cit.*

Jerman amat dibutuhkan guna menopang kinerja Uni Eropa (*European Union/EU*) dalam kancah politik global. Maka reformasi fundamental ekonomi Jerman menjadi prioritas utama. Strateginya antara lain menaikkan pajak.<sup>30</sup> Merkel juga mendukung beberapa gagasan kontroversial Tony Blair agar EU lebih fleksibel dan pragmatis, termasuk pemotongan subsidi pertanian Eropa dari anggaran EU. Dunia bisnis Jerman dan bursa efek di Eropa berharap dengan kemenangan Merkel. Merkel tidak menakuti pemilih dengan resep ‘pil pahit’ memperbaiki keadaan ekonomi. Merkel menjanjikan pemulihan di sektor keuangan serta kebijakan yang lebih bersahabat dengan dunia usaha. Manifesto politik CDU/CSU tentang perlunya interpretasi yang ketat terhadap regulasi mata uang tunggal Eropa (€: Euro)—komitmen yang diciderai Jerman selama ini—merupakan suatu angin baik baik perekonomian dalam negara.<sup>31</sup>

### **3.2.2. Isu-isu dalam Persaingan Kampanye Dua Partai Politik Utama menjelang Pemilu 2005 di Jerman**

Pertarungan dalam pemilu adalah kontes dalam tataran sikap dan kebijakan partai politik terhadap isu-isu kontemporer yang sentral dalam masa kampanye. Dengan kata lain, pemilu bisa juga disebutkan sebagai pertarungan isu. Tinjauan terhadap isu-isu kampanye ini difokuskan pada sikap dua partai politik utama yang selalu bersaing ketat sejak reunifikasi Jerman, yaitu SPD dan CDU/CSU.

Menjelang Pemilu 18 September 2005, mencuat beberapa isu dan masalah yang kiranya menggambarkan hambatan-hambatan Angela Merkel untuk dapat meraih posisi sebagai Kanselir Jerman tahun 2005. Isu-isu yang muncul seputar kebijakan luar negeri, kebijakan imigrasi dan keamanan dalam negeri, kebijakan energi, keluarga, pendidikan dan riset, reformasi perpajakan, pengangguran, layanan kesehatan, pensiun, ekonomi, multikulturalisme, dan energi nuklir. Terlihat 3 isu sentral diantaranya yaitu: kebijakan luar negeri, pengangguran, dan reformasi perpajakan. Dari aspek kebijakan luar negeri, SPD menginginkan agar Jerman menjadi anggota-tetap Dewan Keamanan PBB, mendukung misi Angkatan

<sup>30</sup> Pakpahan, *Op. Cit.*

<sup>31</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, “Seputar Pemilu Legislatif Jerman 2005,” (‘s-Gravenhage, 23 September 2005) diperoleh dari <http://indocase.nl> diakses pada 14 September 2009 pukul 11.03 WIB.

Bersenjata (*Bundeswehr*) ke kawasan krisis serta misi perdamaian, ratifikasi Konstitusi Eropa oleh seluruh negara anggota, menolak cidera janji dalam perundingan dengan Bulgaria dan Romania, serta meneruskan negosiasi dengan Turki. Sedangkan, CDU/CSU ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan AS sekaligus dengan negara anggota EU lainnya—tidak semata dengan Prancis, meneruskan pengerahan *Bundeswehr* dalam misi di luar negeri, regulasi EU hanya bias berlaku jika sesuai dengan bingkai legislasi nasional, menolak bergabungnya Turki ke dalam EU dan hanya bersedia menjalin ‘kemitraan istimewa’ (*privileged partnership*) dengan Ankara, negosiasi bergabungnya Kroasia ke dalam EU segera dilakukan begitu Negara tersebut mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).<sup>32</sup>

Dari segi ekonomi, terdapat juga Isu-isu yang memberatkan Merkel seperti rancangan kebijakan reformasi dari Merkel menimbulkan penolakan karena dianggap tidak dapat menampung aspirasi rakyat Jerman<sup>33</sup> dan CDU dan Merkel sulit untuk meraih simpati buruh Jerman.<sup>34</sup> Terhadap isu pengangguran, Schröder berjanji, jika terpilih kembali, akan menurunkan tingkat pengangguran ke angka 3,5 juta (saat ini angka pencari kerja masih 11%). Untuk itu, Schröder meminta rakyat Jerman untuk bersabar. Sebaliknya, kandidat Kanselir CDU/CSU, Angela Merkel berjanji untuk mempercepat rencana reformasi ekonomi yang telah lama didengung-dengungkan Schröder, mengurangi dominasi asosiasi perusahaan dan karyawan dalam menentukan tingkat upah dalam dunia industri, mengendurkan undang-undang yang mengatur rekrutmen dan pemecatan, dan pemotongan biaya non-tenaga kerja. Berkaitan dengan isu reformasi perpajakan, Merkel mencanangkan program menaikkan 2% pajak pertambahan nilai untuk mengimbangi pengurangan biaya tunjangan sosial yang harus ditanggung oleh perusahaan. Isu ini masih diperdebatkan karena berpotensi menurunkan minat belanja masyarakat. CDU/CSU juga ingin

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Ahmad Erani Yustika, “Schröder, Merkel dan Negara Kesejahteraan,” *Kompas*, 20 September 2005, hlm. 6.

<sup>34</sup> Associated Press, Reuters, dan MYR “Jerman: Merkel Masih Sulit Rangkul Buruh,” *Kompas*, 08 September 2005, 8.

menerapkan pemerataan pajak sebesar 25%, sebuah gagasan yang menguntungkan orang kaya. Wacana ini ditentang oleh SPD yang menilai bahwa kebijakan semacam itu sama saja dengan ‘merampok rakyat miskin, demi kepentingan orang kaya.’<sup>35</sup>

Di Jerman, memang kesuksesan dari sapaan reformasi sosial bergantung pada konsensus dari dua partai besar (SPD dan CDU) ini. Secara keseluruhan, mereka tidak pernah menentang susunan kelembagaan yang terbentuk dari sektor sosial. Konsensus dasar sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental paket kebijakan sosial Jerman selain dari Inggris Raya tetapi tidak dari Swedia atau Belanda. Hampir semua Negara kesejahteraan telah mengembangkan sebuah hubungan komplementer yang tahan lama antara ekonomi dan kebijakan sosial yang dikarakterisasi oleh konsensus dasar antara partai borjuis dan pekerja yang kembali ke kompromi tentang negara kesejahteraan. Bagaimanapun, selama beberapa dekade terakhir (tidak sedikit karena reunifikasi Jerman), tumbuh perbedaan-perbedaan antara dua partai besar dengan referensi kepada ekonomi dan isu-isu kebijakan sosial.<sup>36</sup> Namun, meskipun dibebani oleh isu-isu tersebut, Angela Merkel berhasil keluar sebagai pemenang dan terpilih untuk menduduki posisi kekuasaan tertinggi dalam Negara: Kanselir Federal Jerman pada tahun 2005.

### 3.3. Hasil Pemilu

Setelah melewati berbagai proses, dari 61,870,711 total pemilih terdaftar dan 48,044,134 (77.7%) pemilih, Pemilu 2005 menghasilkan *Erststimme* yang valid sebesar 47,194,062 pemilih (98.2%) dan yang tidak valid sebesar 850,072 orang (1.8%). Sedangkan jumlah *Zweitstimme* yang valid sebesar 47,287,988 orang (98.40%) dan yang tidak valid sebanyak 756,146 orang (1.60%). Untuk perolehan suara hasil Pemilu dapat dilihat sebagai berikut:<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, *loc. Cit.*

<sup>36</sup> Thomas Meyer dan Nicole Breyer, *The Future of Social Democracy*, New Delhi: Samskriti, 2007, hlm. 214.

<sup>37</sup> Manuel Álvarez Rivera, “Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup”, diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2005> diakses pada 28 April 2010 pukul 14.15.

**Tabel 3.1 Hasil Pemilu Total Republik Federal Jerman 18 September 2005**

Party	First Votes	%	Direct Seats	Second Votes	%	List Seats	Total Seats
Christian Democratic Union/Christian Social Union	19,280,940	40.90	150	16,631,049	35.2	76	226
Christian Democratic Union (CDU)	15,390,950	32.6	106	13,136,740	27.8	74	180
Christian Social Union (CSU)	3,889,990	8.2	44	3,494,309	7.4	2	46
Social Democratic Party of Germany (SPD)	18,129,100	38.4	145	16,194,665	34.2	77	222
Free Democratic Party (F.D.P.)	2,208,531	4.7	0	4,648,144	9.8	61	61
The Left Party	3,764,168	8	3	4,118,194	8.7	51	54
Alliance 90/The Greens	2,538,913	5.4	1	3,838,326	8.1	50	51
National Democratic Party of Germany (NPD)	857,777	1.8	0	748,568	1.6	0	0
The Republicans	38,678	0.1	0	266,101	0.6	0	0
Others	375,955	0.8	0	842,941	1.8	0	0

Sumber: "Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup", diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2005> diakses pada 28 April 2010 pukul 14.15.

Untuk lebih mudahnya, Persentase Perolehan Suara dan Kursi di Parlemen (2005) dapat juga dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Hasil Pemilu Total Republik Federal Jerman 18 September 2005**

	Partai				
	SPD	Die Grünen	DieLinke/PDS	FDP	CDU/CSU
Kursi	222	51	54	61	226
Suara (%)	34,3%	8,1%	8,7%	9,8%	35,2%
Fluktuasi	(-4,2%)	(-0,5%)	(+4,7%)	(+2,4%)	(-3,3%)

Sumber: Gunaryadi dan Dessy Nataliani, Seputar Pemilu Legislatif Jerman 2005, ('s-Gravenhage, 23 September 2005) diperoleh dari <http://indocase.nl> diakses pada 14 September 2009 pukul 11.03 WIB.

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa CDU berhasil membawa Merkel menjadi Kanselir Jerman dengan memenangkan Pemilu dengan 35.2% suara, atau



226 kursi, melawan 34.3% suara (222 kursi) untuk Gerhard Schröder dari SPD. Sementara itu, FDP mendapat 9.8% suara (61 kursi), *The Left* 8.7% suara (54 kursi) dan Partai Hijau 8.1% suara (51 kursi). Dengan demikian, jumlah kursi di *Bundestag* (parlemen) kini 614 (setiap Pemilu jumlahnya berubah antara 598-615 kursi), dan dibutuhkan 308 kursi untuk menjadi mayoritas.

Dengan hasil ini, CDU pun mengharapkan akan adanya partner koalisi. Namun Merkel tidak mungkin mampu membentuk koalisi pilihan dan mungkin harus bergabung dengan SPD/Kiri tengah. Partai politik pro-bisnis FDP, dengan 9,8% suara, dengan sangat baik telah memberikan 61 kursi. Tetapi ini pun tidak cukup untuk mengamankan sebuah mayoritas bersama. *The Left* mengambil 8,7% suara (54 kursi), dan Partai Hijau, mitra koalisi Schröder, memenangkan 8,1% suara (51 kursi). Dalam penghitungan cepat yang dilakukan oleh  *Davids Medienkritik* atas observasi mereka kepada sejumlah hasil yang dikeluarkan oleh sejumlah media di Jerman, CDU-CSU jauh lebih lemah daripada yang diharapkan.<sup>38</sup> Dukungan terhadap CDU terhitung menurun semenjak Merkel dari kubu oposisi CDU terus memimpin dalam jajak pendapat, saat Schröder mengumumkan penyelenggaraan pemilu dini, sampai sekitar 20%.<sup>39</sup>

Sementara itu, Schröder tidak mengakui kekalahan dan bersikeras untuk tetap bisa menjadi Kanselir. Schröder membayangkan sebuah koalisi besar dari kedua partai terbesar, tetapi hanya jika ia menjadi pemimpinnya. Dengan perolehan suara yang hampir seimbang antara SPD dan CDU/CSU, Jerman menghadapi berminggu-minggu ketidakpastian politik sebagaimana partai-partai politik saling bernegosiasi untuk membentuk koalisi. Kanselir Schröder mempertanyakan pernyataan yang dibuat Merkel tentang mandat politik yang telah didapatkan, menjelang akhir perhitungan suara, untuk membentuk pemerintahan. Schröder mengakui keinginannya untuk masih menjabat sebagai Kanselir Jerman untuk 4 tahun

<sup>38</sup> Ray D., "German National Election: Unexpected Results (Surprising Numbers: CDU-CSU Much Lower - FDP Much Higher Than Expected)," (18 September 2005), diperoleh dari [http://medienkritik.typepad.com/blog/2005/09/2005\\_german\\_nat.html](http://medienkritik.typepad.com/blog/2005/09/2005_german_nat.html), diakses pada 28 April 2010 pukul 15.45 WIB.

<sup>39</sup> Associated Press, Agence France Presse, Reuters, dan MYR, "Pemilu Jerman: Partai Angela Merkel Terus Memimpin," *Kompas*, 30 Agustus 2005, 8.

mendatang agar dapat menuntaskan program reformasinya. Secara teoritis peluang Schröder masih terbuka untuk menjadi Kanselir untuk ketiga kalinya, karena semuanya tergantung hasil negosiasi dengan partai-partai lain untuk membentuk koalisi.<sup>40</sup>

Hasil yang relatif dekat antara CDU-CSU dengan SPD membuat baik Schröder maupun Merkel masih mungkin untuk mendapatkan posisi Kanselir. Masih terlihat seperti CDU-CSU memiliki posisi sedikit lebih baik, tetapi semuanya dapat menjadi mungkin, dengan fakta bahwa Schröder jauh lebih populer dibandingkan daripada Merkel. Selisih distribusi kursi memang sangat dekat antara CDU-CSU dan SPD setelah semua penghitungan dilakukan. SPD melakukan pekerjaan jauh lebih baik dalam kampanye, dengan simpatisan media di sampingnya, dalam satu penampilan yang diharapkan dalam menghadapi masalah-masalah domestik Jerman yang besar. Banyak pemilih konservatif tampak memberikan suara mereka kepada FDP daripada CDU-CSU. Hasil ini akan sangat melemahkan Merkel untuk mencapai posisi Kanselir.<sup>41</sup>

Dunia internasional turut memberikan reaksi yang beragam terhadap hasil pemilu di Jerman. Rusia memuji Schröder sebagai ‘pemenang secara moral.’ Media Turki juga gembira dengan prestasi CDU/CSU yang kurang cemerlang dalam pemilu karena partai ini menolak bergabungnya Turki secara penuh ke dalam EU. Sementara di Inggris, publik menterjemahkan kebuntuan politik akibat pemilu Jerman merupakan suatu pertanda bahwa negara tersebut takut dengan masa depan khususnya dengan semakin kompleksnya globalisasi. Disamping itu, dunia internasional pun tidak menginginkan berlarutnya negosiasi koalisi di Jerman. Mereka menginginkan segera terpilih Kanselir yang definitif, apakah itu Schröder, Merkel, atau Menteri luar negeri Fischer, meskipun yang bersangkutan telah menyatakan akan mengundurkan diri sebagai ketua *Die Grünen* jika partai tersebut memilih berposisi di parlemen. Bagi EU sendiri, pilihan yang paling kondusif bagi kebijakan EU adalah kemungkinan koalisi SPD, *Die Grünen* dan FDP, dan Schröder

---

<sup>40</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, “Seputar Pemilu Legislatif Jerman 2005”, (’s-Gravenhage, 23 September 2005) diperoleh dari <http://indocase.nl> diakses pada 14 September 2009 pukul 11.03 WIB.

<sup>41</sup> Ray D., *Loc. Cit.*

sebagai Kanselir. Dan jika Merkel terpilih menggantikan Schröder, maka Merkel tidak saja mengubah dataran politik Jerman tetapi juga wajah Eropa. Melihat sikap dan kebijakan CDU/CSU terhadap isu-isu kampanye di atas, Jerman di bawah Merkel akan mengurangi intensitas hubungannya dengan Prancis yang bersama Jerman dekade terakhir merupakan tulang-punggung integrasi EU dan hubungan Berlin dengan Moskow. Dan lebih merapat ke Inggris dan negara anggota EU yang lebih kecil dan anggota baru yang memiliki banyak kesamaan dalam kebijakan luar negeri Merkel seperti Polandia, dan lain-lain. Yang jelas, wajah diplomasi peta diplomatik EU kemungkinan akan berubah.

Maka, secara kalkulatif, ada 3 skenario koalisi yang mungkin: (1). SPD dan CDU/CSU; (2). SPD, Die Grünen dan FDP; (3). CDU/CSU, FDP, dan Die Grünen. Sedangkan dengan DieLinke/PDS, kedua partai besar tadi telah menutup pintu koalisi. Menurut perhitungan ini, peluang antara Schröder dan Merkel untuk menjadi Kanselir kurang lebih sama. Tetapi, politik tidak hanya masalah perhitungan angka. Dan menurut Konstitusi Jerman, Presiden Federal memiliki hak untuk mengajukan calon Kanselir, dengan mempertimbangkan masukan dari partai-partai politik di parlemen. Tetapi jika semuanya mengalami kebuntuan, maka Presiden bisa mengajukan calon yang paling kuat, atau membekukan parlemen dan menyerukan pemilu yang baru.<sup>42</sup> Banyak politisi terkemuka, secara kategoris, mengesampingkan adanya kemungkinan perubahan situasi seperti ini sebelum Pemilu. Akan tetapi dalam politik hal seperti ini tidak dapat diprediksi, kekuasaan dapat menjadi sangat menggoda.<sup>43</sup> Akhirnya, setelah melewati beberapa minggu negosiasi, CDU-CSU dan SPD sepakat untuk membentuk sebuah koalisi "besar" di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel. Angela Merkel dan kabinet baru pun dilantik pada tanggal 22 Nopember 2005.

---

<sup>42</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> Ray D., *loc. Cit.*

## **BAB 4**

### **FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN ANGELA MERKEL PADA PEMILU JERMAN TAHUN 2005**

Meskipun bertemu dengan berbagai masalah dan isu yang berkembang menjelang Pemilu, salah satunya adalah isu tentang identitasnya yang relatif marginal dalam masyarakat, Angela Merkel berhasil terpilih sebagai Kanselir Jerman perempuan dan orang (bekas) Jerman Timur pertama sepanjang sejarah negara Jerman sendiri. Terdapat beberapa faktor kemenangan yang dapat menjelaskan bagaimana Merkel bisa mencapai prestasi yang tinggi ini. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam pribadi Merkel sebagai aktor sementara faktor eksternal berasal dari lingkungannya seperti partai politik dan masyarakat pemilih.

#### **4.1 Faktor Internal : Penampilan Personal Angela Merkel**

Merkel telah diperkenalkan dengan baik, ke dalam dunia politik, oleh Helmut Kohl sejak dari masa awal re-unifikasi.<sup>1</sup> Merkel telah dua kali menjabat sebagai menteri pada era pemerintahan Kohl. "Mandat Berlin" pada konferensi iklim di Berlin pada tahun 1995 adalah pencapaian Merkel yang paling penting saat masih menjadi menteri Kohl; mandat Berlin menjadi dasar untuk protokol Kyoto. Oleh karena itu, masyarakat Jerman sudah tidak asing lagi kepada sosok Merkel sebagai salah satu kandidat Kanselir pada tahun 2005. Terlepas identitasnya sebagai perempuan dan orang (bekas) Jerman Timur, Angela Merkel memiliki penampilan politis disorot dengan baik, yang menjadi salah satu faktor penting untuk bersaing dalam arena politik. Merkel belajar dengan cepat, tidak pernah mengulang kesalahan, dan mampu, dengan mudah, untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Dalam beberapa situasi, Merkel telah menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang

---

<sup>1</sup> Wawancara mendalam dengan Gabriele Otto, Staf Pengajar Program Studi Jerman FIB UI, 31 Maret 2010.

yang tahu kapan harus mengambil resiko dan bagaimana untuk tetap bersikap tenang di bawah tekanan.<sup>2</sup>

Kinerja publik Merkel dan Schröder dalam kampanye di media tidak jauh berbeda dalam karakter dan gaya. Schröder adalah seorang pelaku media dan seorang pembicara publik yang berbakat. Schröder pandai memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin pemerintahan yang berkuasa dan negarawan yang berpengalaman untuk memberikan penampilan yang terbaik kepada masyarakat. Namun banyak orang yang merasa bahwa sikap-sikap Schröder mengisyaratkan kesombongan.<sup>3</sup> Citra Schröder semakin buruk, dibandingkan dengan Merkel, dengan adanya kegagalan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya.

Di sisi lain, Merkel mampu menampilkan sosok penantang yang menumbuhkan semangat dan kepercayaan baru di tengah masyarakat. Merkel memiliki kemauan yang kuat dalam berpolitik dan memiliki strategi politik yang baik. Satu hal yang menjadi poin lebih untuk Merkel adalah etika serta gayanya dalam berpolitik dan dalam memimpin pemerintahan. Merkel tidak berperilaku otoriter seperti pemerintahan Schröder. Terdapat beberapa kelompok di Jerman yang tidak menyukai gaya pemerintahan yang otoriter dan cara memimpin Merkel yang lebih halus membuatnya lebih disukai. Merkel telah bekerja dengan sangat baik untuk memperkenalkan gaya dan perilaku politiknya kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagai pemimpin CDU, Merkel memiliki gaya politik personal yang sangat istimewa. Merkel adalah seorang politisi yang netral, yang dapat mengkombinasi beberapa unsur. Pada posisi tertentu, Merkel lebih suka berada di “Tengah” dan ini menjadikan pemerintahannya menjadi istimewa. Merkel mencoba mendorong posisi CDU ke arah Tengah, sehingga tidak lagi menjadi partai yang konservatif. Lewat

---

<sup>2</sup> Werner Reutter, “Who's Afraid of Angela Merkel?: The Life, Political Career, and Future of the New German Chancellor” dalam *International Journal*, Vol. 61, No. 1, Turkey: Myths and Realities, Canadian International Council (2005/2006), hlm. 216-222, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/40204139> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 13.46 WIB.

<sup>3</sup> Ludger Helms, “Germany's Crisis and Struggle for Political Self-Reinvention: The 2005 Federal Election in Context” dalam *German Studies Review*, Vol. 29, No. 2 (2006), 315-330, hlm. 321, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/27668037> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 15.30 WIB.

<sup>4</sup> Otto, *Op. Cit.*.

pengaruhnya sebagai ketua partai, Merkel merubah gambaran partainya yang konservatif, menunjukkan ide-ide politiknya dengan cara yang pintar, meskipun kebijakan partai sendiri masih bersifat neo-liberal.<sup>5</sup> Selain itu, meskipun seorang Jerman Timur, Merkel dan partainya bersikap pro terhadap Amerika Serikat, yang telah memberi perhatian yang khusus terhadap Eropa Timur, terutama Jerman. Namun tidak berarti Merkel menentang Rusia. Sama halnya dengan Schröder yang mengikuti Rusia dalam sektor energi dan ekonomi, Merkel juga tetap terus memberikan prioritas untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Rusia. Sampai saat ini, Jerman sepenuhnya terintegrasi ke Barat melalui berbagai hubungan. Sementara itu juga memiliki kepentingan ekonomi yang penting di Rusia.<sup>6</sup> Dengan begitu, Merkel memposisikan dirinya untuk berada di tengah kekuatan-kekuatan yang ada. Sikap Merkel yang tidak memblok karakternya sebagai orang Jerman Timur ini dapat menjadi menguntungkan untuk menarik lebih banyak pendukung. Kaupert mengakui bahwa masyarakat Jerman, dengan kondisi politik pada saat itu, lebih menyukai sesuatu yang konsensual demi keluar dari krisis yang melanda negara.<sup>7</sup>

Merkel juga mencoba menjadi moderat sebisa mungkin. Di samping pro terhadap Amerika Serikat, Merkel tetap memelihara hubungan dengan Rusia. Meskipun memiliki kekuatan, Merkel tidak memerintah dengan arahnya sendiri. Merkel tidak mengemukakan pendapat personalnya dalam menghadapi suatu kasus tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan orang-orang kepercayaannya.<sup>8</sup> Dalam gaya bicaranya pun tidak selalu langsung menuju sasaran, Merkel memperlihatkan banyak hal kepada orang-orang sebelum menuju pada poin utamanya. Gaya inilah yang membuatnya terlihat lebih baik dan menarik dibandingkan Schröder.<sup>9</sup> Formasi koalisi besar yang dibentuk Merkel adalah lebih dari bukti akan bakat politiknya yang

---

<sup>5</sup> Wawancara mendalam dengan Philipp Kaupert, Wakil Direktur Lokal Friedrich Ebert-Stiftung Jakarta, 21 April 2010

<sup>6</sup> F. Stephen Larrabee, "Danger and Opportunity in Eastern Europe" dalam *Foreign Affairs*, Vol. 85, No. 6, *Council on Foreign Relations* (2006), hlm. 128-129, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/20032147> (Jstor) database, diakses pada 19 April 2010 pukul 15.30 WIB.

<sup>7</sup> Kaupert, *Op. Cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Wawancara mendalam dengan Gabriele Otto, Staf Pengajar Program Studi Jerman FIB UI, 31 Maret 2010.

luar biasa. Sikap pragmatisme dan realisme membantunya untuk mengtransformasikan satu kekalahan "Pemilu" menjadi sebuah kemenangan.<sup>10</sup> Merkel adalah manajer yang pintar. Sementara Schröder adalah seorang yang kharismatik namun terkadang menjadi impulsif dan sangat emosional. Menurut Kaupert, pada saat itu, masyarakat lebih menyukai sosok dengan pendekatan yang netral seperti Merkel.<sup>11</sup>

Faktor kualitas personal ini menjadi salah satu faktor kemenangan bagi Merkel. Kemampuan politiknya telah membawa Merkel pada satu pencapaian yang luar biasa, tidak peduli bagaimana identitasnya maupun darimana ia berasal, sebagai seorang perempuan maupun sebagai orang (bekas) Jerman Timur. Pendukung Merkel, termasuk sebagian besar wartawan, memuji gaya "anti-populis"-nya. Mengingat sulit untuk menandingi kharisma yang kuat dan keterampilan media dari seorang Kanselir *incumbent* seperti Schröder, pendekatan Merkel berhasil menampilkan kebijakan/sifat-sifat baik dirinya lebih dari yang diperlukan.<sup>12</sup>

Merkel telah bekerja dengan keras dan bisa mempresentasikan Jerman (secara keseluruhan) dengan baik di mata dunia. Kedua informan, Jarrar dan Nestler, mengakui bahwa identitas bukan merupakan suatu permasalahan dan tidak memiliki arti penting bagi para pemilihnya.<sup>13</sup> Pemilih tidak terpengaruh oleh identitas Merkel sebagai mantan Jerman Timur ataupun sebagai perempuan.<sup>14</sup>

## 4.2 Faktor Eksternal

### 4.2.1 Identifikasi Partai Politik sebagai Faktor yang Determinan dalam Pemilu Jerman: CDU

<sup>10</sup> Werner Reutter, "Who's Afraid of Angela Merkel?: The Life, Political Career, and Future of the New German Chancellor" dalam *International Journal*, Vol. 61, No. 1, Turkey: Myths and Realities, Canadian International Council (2005/2006), hlm. 225, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/40204139> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 13.46 WIB.

<sup>11</sup> Kaupert, *Op. Cit.*

<sup>12</sup> Ludger Helms, "Germany's Crisis and Struggle for Political Self-Reinvention: The 2005 Federal Election in Context" dalam *German Studies Review*, Vol. 29, No. 2 (2006), 315-330, hlm. 321, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/27668037> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 15.30 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara mendalam dengan Aisha Maria Jarrar, Anggota DAAD, 2010, 30 Maret.

<sup>14</sup> Wawancara mendalam dengan Bernd Nestler, Pegawai PT Clariant Indonesia, 2010, 1 April.

#### 4.2.1.1 Persaingan dalam Partai Politik CDU

Pada Pemilu 2002, Merkel sudah menjabat sebagai ketua CDU namun untuk melawan Schröder, aliansi CDU/CSU mengajukan calon Kanselir dari partai CSU, Edmund Stoiber karena alasan popularitas Angela Markel dinilai kurang populer. Dan karena seorang perempuan belum dipercaya untuk maju sebagai kandidat Kanselir. Meskipun CDU lebih besar dari CSU yang hanya partai lokal di Bavaria. Merkel, sebagai seorang perempuan tidak bisa langsung diterima dan diberi kepercayaan oleh partai politik Kristen yang sarat akan nilai patriarkal. Namun Stoiber gagal dan Schröder kembali menjabat menjadi Kanselir. Maka pada periode selanjutnya (Pemilu 2005), Merkel sebagai ketua CDU, sudah sewajarnya, maju sebagai kandidat utama dari CDU/CSU untuk menjadi Kanselir dan melawan Schröder dalam Pemilu 2005. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa di belakang Merkel, berdiri seorang yang hebat dan memiliki pengaruh besar dalam pencapaian keberhasilan Merkel dalam CDU, yaitu Helmut Kohl. Merkel selalu menjadi “anak perempuan” Helmut Kohl. Schnieder, salah satu informan penelitian ini, berpandangan bahwa menjelang Pemilu, banyak hal dapat menjadi mungkin, termasuk hal-hal yang ada di luar kondisi normal.<sup>15</sup>

Selain karena dukungan dari Kohl, Merkel juga menarik karena tampil sebagai perempuan modern. Selama ini Jerman memiliki Helmut Kohl, seorang laki-laki tua, dan Gerhard Schröder, ataupun Edmund Stoiber, yang masyarakat sudah lelah dengannya, maka mengapa tidak untuk mencoba memilih perempuan sebagai pemimpin. Baik laki-laki ataupun perempuan pasti sama-sama mamiliki kelebihan ataupun kekurangan, tidak ada yang sempurna. Schnieder mengatakan bahwa rasanya sangat modern untuk memilih perempuan yang mampu. Meskipun merkel adalah perempuan, tapi ia bisa bertindak seperti laki-laki. Dia dapat menyatu secara internasional.<sup>16</sup>

Merkel sebagai perempuan dapat menjadi daya tarik yang berbeda untuk CDU pada Pemilu 2005. Bagi generasi muda perempuan yang berpendidikan dan yang

<sup>15</sup> Wawancara mendalam dengan Guido Schnieder, Anggota DAAD, 31 Maret 2010.

<sup>16</sup> *Ibid.*



memenuhi syarat, pilihan politik tergantung pada bagaimana mereka, secara pribadi, melihat seberapa kompeten sebuah partai politik untuk menjadi sesuatu. CDU-CSU telah memasuki era paska-perang dengan bonus dukungan, yang tidak perlu diragukan lagi, dari kelompok perempuan dan dengan mayoritas dukungan di antara para pemilih perempuan dari seluruh kelompok usia. Di antara wanita yang lebih tua, kondisinya tak banyak yang berubah. Di antara perempuan yang lebih muda, SPD mulai mengumpulkan dukungan pada tahun 1960 dengan membentuk anggapan sebagai partai pembela hak-hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan. Pada tahun 1970, Sosial Demokrat sudah dapat membangun posisi mereka dalam pemerintahan dan mendapat dukungan dari pemilih perempuan sebagaimana yang Kristen Demokrat telah lakukan pada tahun 1950. Pada 1980-an, harapan atas kesempatan yang sama tidak terpenuhi, dan tidak ada pihak-pihak yang dapat mengandalkan dukungan dari pemilih generasi muda perempuan yang berpendidikan. SPD pun kehilangan kredibilitas ketika pemerintah Schmidt. Tampaknya banyak jenis reformasi sosial yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan; CDU terus menderita kekurangan dukungan di kalangan perempuan di bawah usia empat puluh; dan pada saat ini pula Partai Hijau melakukan beberapa pengumpulan: sebuah mobilisasi generasi secara elektoral, namun jatuh cukup jauh pada golongan perempuan dari kalangan anak muda dan berpendidikan.<sup>17</sup>

CDU butuh modernisasi karena CDU tanpa modernisasi pun akan semakin kehilangan banyak suara. Merkel dapat menjadi Kanselir pun, karena CDU butuh modernisasi karena Merkel bisa membuat CDU terlihat lebih modern. Sebagian besar bagian dalam CDU masih menganut ide-ide dan nilai-nilai keluarga yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada peran-peran dalam model tradisional. Contohnya, pengenaan biaya pendidikan taman kanak-kanak, yang sebaiknya gratis, berdasarkan pemikiran yang melihat bahwa anak harus dibesarkan oleh ibunya, yang sebaiknya tinggal di rumah, menjaga anak, memasak, sementara laki-laki (ayah) berjuang di luar sana, berburu hewan-hewan untuk kemudian dibawa pulang ke

---

<sup>17</sup> Gordon Smith, William E. Paterson, and Peter H. Merkl, *Developments in West German Politics*, (Durham: Duke University Press, 1989), hlm. 261.

rumah. Sehingga ia akan dikagumi istrinya karena ia kuat. Ada kecendrungan seperti ini pula dalam ide-ide CDU yang terepresentasikan dalam politiknya di dalam Negara Jerman. Seorang ibu yang mengurus anaknya selama tiga bulan dan kemudian kembali bekerja, dan menaruh anaknya di tempat penitipan anak, diidentifikasi sebagai Ibu yang buruk di tengah masyarakat. Di Jerman, seorang wanita sebagai seorang Ibu sudah selayaknya berkorban demi anaknya. Sementara di Negara-negara Eropa lain, hal seperti itu bukanlah suatu masalah. Merkel membawa perubahan dalam hal itu, membawa modernisasi ke dalam CDU. CDU pun berubah karena Merkel. CDU yang lama telah kehilangan banyak dukungan suara dari perempuan dan anak muda. Dan sekarang CDU dapat terlihat lebih modern di kalangan itu. Sementara itu, Gerhard Schröder Kanselir dari SPD, tiba-tiba menjadi terlihat tua dan konservatif. Di sisi lain, dengan modernisasi dan Merkel-nya, CDU terlihat lebih bergaya.<sup>18</sup>

#### **4.2.1.2 CDU dan Merkel dalam Pemilu: Identifikasi Kandidat dan Identifikasi Partai Politik**

Pencapaian Merkel dalam CDU maupun dalam Pemilu *Bundestag* Jerman tahun 2005 tidaklah diperoleh dengan mudah. Merkel diidentifikasi sebagai seorang Perempuan di tengah sistem sosial politik masyarakat Jerman yang patriarkal dan sebagai orang (bekas) Jerman Timur di dalam kesenjangan yang tajam antara masyarakat (bekas) Jerman Barat dan masyarakat (bekas) Jerman Timur. Namun uniknya, Merkel adalah seorang kandidat dari partai politik yang dapat diidentifikasi bertentangan dengan identitas Merkel sendiri. CDU adalah partai politik Kristen patriarkal dengan nilai-nilai Neo-liberal yang memiliki dukungan akar rumput mayoritas dari wilayah Jerman Barat. Identifikasi kandidat dan identifikasi partai politik yang bertolak belakang ini dapat mempengaruhi proses pencapaian keberhasilan Merkel dalam Pemilu. Identifikasi terhadap partai politik terdicitra lebih kuat dalam masyarakat dibandingkan kepada identifikasi atas identitas Merkel sebagai seorang individu karena pada saat Pemilu pun masyarakat memilih partai

---

<sup>18</sup> Schnieder, *Op. Cit.*

politik, bukan memilih langsung kepada kandidat. Untuk mengkaji lebih jelas bagaimana identitas dan citra partai politik CDU berwujud lebih kuat dan lebih determinan dalam Pemilu dibandingkan dengan identitas Merkel sendiri sebagai kandidatnya, dapat dilihat sebagai berikut:

#### **IV.2.1.2.1 Angela Merkel Seorang Perempuan dan CDU yang Patriarkis**

Merkel adalah seorang perempuan dalam dunia politik Jerman yang maskulin. Politik maskulin ini dapat dilihat, salah satunya, dalam masyarakat tradisional dimana politik dilihat sebagai hubungan patron-klien yang mengambil bentuk dari struktur bapak-anak-keluarga.<sup>19</sup> Patriarkalisme sendiri adalah filsafat politik yang didasarkan pada doktrin otoritas alami seorang Bapak untuk memimpin keluarganya sama dengan raja, dengan otoritas mutlak atas rakyatnya.<sup>20</sup>

Fenomena Patriarkalisme, sebagai salah satu hambatan, dapat ditemui dalam usaha dan proses pencapaian kesuksesan Merkel, dalam CDU maupun dalam persaingan politik yang lebih luas di dalam negara Jerman. Namun, dalam menghadapi hambatan ini, tidak dapat dilupakan bahwa Merkel memang mendapat dukungan dan bantuan dari Helmut Kohl, sebagai elit partai yang sangat berpengaruh dalam CDU. Sulit untuk membayangkan Angela Merkel sebagai Kanselir perempuan pertama Jerman tanpa Helmut Kohl. Kohl menunjuk Merkel sebagai menteri pada tahun 1991 dan 1994; Kohl menjadikannya sebagai satu-satunya wakil ketua partai federal pada tahun 1991; dan Kohl juga mendukung pencalonan Merkel untuk menjadi ketua CDU pertama kali di Brandenburg dan pada tahun 1993 di Mecklenburg, Pomerania Barat. Merkel sendiri mengakui bahwa, pada awalnya, tidak mudah untuk mendapatkan kemurahan hati dan dukungan dari Kohl, bukan karena pengalaman politiknya melainkan lebih pada kenyataan bahwa dirinya adalah seorang yang masih muda, seorang wanita, dan berasal dari Jerman Timur. Namun, untuk mencapai kesuksesan, Merkel harus mendapatkan kepercayaan Kohl meskipun

<sup>19</sup> Gadis Arivia, "Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan" dalam *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hlm. 3.

<sup>20</sup> Carole Pateman, *Democracy, Feminism, and Political Theory*, (U.S.A: Stanford University Press, 1989), hlm. 36.

kemudian Merkel sempat mengeluhkan tentang bimbingan dan gaya kepemimpinan Kohl yang Patriarkal. Merkel disebut-sebut sebagai "*Kohl's Madchen*," "*Kohl's little girl*," "anak perempuan kecil kesayangan Kohl," Merkel pun pernah dijuluki sebagai "boneka" akhir era Kohl.<sup>21</sup> Peran Kohl sangat besar atas Merkel. Kohl telah menjadi "Bapak" yang membantu Merkel sebagai "anak"nya, untuk menghadapi arena politik Jerman yang maskulin.

Laki-laki ataupun perempuan adalah sama. Mereka sama-sama mampu untuk menjadi Kanselir. Tetapi Jarrar mengakui bahwa Merkel memang harus lebih kuat dari laki-laki karena ia perempuan dan dia harus mewakili Jerman di hadapan seluruh dunia sementara memang benar bahwa sektor politik didominasi oleh laki-laki. Maka faktor penting dalam perjalanan karir politik Merkel adalah seluruh dukungan yang didapat dari Helmut Kohl. Posisinya di bawah naungan Kohl menjadi lebih penting dan berpengaruh terhadap identitasnya sebagai seorang perempuan dalam ruang politik yang maskulin.<sup>22</sup> Laki-laki mendominasi arena politik; laki-laki memformulasikan aturan permainan politik; dan laki-laki pula yang mendefinisikan standar untuk evaluasi.<sup>23</sup> Begitupun yang terjadi dalam CDU. Dan Merkel mendapat bantuan yang sangat besar dari Kohl untuk masalah ini. Termasuk untuk menghadapi beberapa kelompok yang skeptis terhadapnya.<sup>24</sup>

Dalam CDU yang patriarkis, ada dominasi kekuatan dari kaum laki-laki. Kebijakan dan keputusan partai dipengaruhi oleh doktrin patriarkal, seperti yang dikemukakan Carole Pateman, ada sosok Bapak yang memiliki otoritas alami untuk memimpin dan memerintah keluarganya, dalam kasus ini untuk menentukan keputusan partai. Kohl telah menjadi "Bapak" bagi Merkel dalam CDU. Kohl yang memberi dukungan, bekal dan pengajaran bagi Merkel untuk mencapai

<sup>21</sup> Werner Reutter, "Who's Afraid of Angela Merkel?: The Life, Political Career, and Future of the New German Chancellor" dalam *International Journal*, Vol. 61, No. 1, Turkey: *Myths and Realities*, Canadian International Council (2005/2006), hlm. 215, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/40204139> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 13.46 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara Mendalam dengan Aisha Maria Jarrar, Anggota DAAD, 30 Maret 2010.

<sup>23</sup> Nadezdha Shvedova, "Kendala-Kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen" dalam Azza Karam, *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hlm. 20.

<sup>24</sup> Wawancara Mendalam dengan Gabriele Otto, Staf Pengajar Program Studi Jerman FIB UI, 31 Maret 2010.

keberhasilannya. Kohl yang membantu Merkel menghadapi posisinya yang subordinat, sebagai perempuan dan orang Jerman Timur yang masih dipandang marjinal, dalam CDU. Oleh karena itu, meskipun telah terpilih, Merkel tidak bertindak sebagai perempuan dalam politik. Merkel adalah produk didikan Kohl dengan gaya yang patriarkis. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan publik, Merkel tidak bermain dalam konteks identitasnya sebagai perempuan, Merkel tetap mengikuti garis-garis partainya yang patriarkis.

Sementara itu, bagi masyarakat pemilih, bukan suatu persoalan apakah yang akan menjadi Kanselir itu adalah seorang perempuan atau laki-laki.<sup>25</sup> Identitas Angela Merkel sebagai perempuan hanya berpengaruh bagi sebagian kecil pemilih, misalnya untuk gerakan feminis dan para pendukung emansipasi perempuan<sup>26</sup>, dan sama sekali tidak berpengaruh bagi kelompok pemilih lain. Gender telah menjadi salah satu aspek pertimbangan bagi banyak pemilih, tapi bukan faktor yang sangat menentukan.<sup>27</sup>

Lagipula, meskipun identitas perempuan dalam diri Merkel adalah sebuah simbol dan penting dalam membentuk figurinya untuk sebagian kelompok, namun Merkel tidak bermain dalam konteks ini. Merkel tidak mengikuti pola perempuan tradisional Jerman. Hanya saja Merkel menunjukkan dan memberi contoh bagi perempuan lain untuk berperilaku dengan cara yang lebih modern. Bahkan di beberapa sektor, Merkel berperilaku selayaknya politisi laki-laki. Dia tidak menggunakan gaya politik perempuan.<sup>28</sup> Bagaimanapun, Merkel mendapat pengaruh dari Kohl dan garis partai CDU yang patriarkis.

Dalam struktur pemerintahan pun, belum bisa dikatakan bahwa Merkel telah membawa perubahan yang signifikan untuk kaum perempuan. Jika membandingkan kehadiran perempuan dalam kabinet Schröder II, kabinet Merkel I dan kabinet Merkel II terlihat bahwa tidak ada perubahan jumlah anggota perempuan dalam

---

<sup>25</sup> Wawancara Mendalam dengan Bernd Nestler, Pegawai PT Clariant Indonesia, 1 April 2010.

<sup>26</sup> Aisha Maria Jarrar, *Op. Cit.*

<sup>27</sup> Bernd Nestler, *Op. Cit.*

<sup>28</sup> Wawancara Mendalam dengan Philipp Kaupert, Wakil Direktur Lokal Friedrich Ebert-Stiftung Jakarta, 21 April 2010.

kabinet. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Kabinet Schröder II, yang berlaku mulai 22 Oktober 2002, sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Kabinet Schröder II**

Jabatan	Nama	Partai Politik	Jenis Kelamin
Federal Chancellor	Gerhard Schröder	SPD	L
Federal Foreign Minister and Vice-Chancellor	Joschka Fischer	Alliance '90/The Greens	L
Federal Minister for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety	Jürgen Trittin	Alliance '90/The Greens	L
Federal Minister of Economics and Labor	Wolfgang Clement	SPD	L
Federal Minister of Defence	Peter Struck	SPD	L
Federal Minister for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth	Renate Schmidt	SPD	P
Federal Minister of the Interior	Otto Schily	SPD	L
Federal Minister of Education and Research	Edelgard Bulmahn	SPD	P
Federal Minister of Health	Ulla Schmidt	SPD	P
Federal Minister of Food, Agriculture and Consumer Protection	Renate Künast dan Jürgen Trittin	Alliance '90/The Greens	P dan L
Federal Minister of Finance	Hans Eichel	SPD	L
Federal Minister of Transport, Building and Urban Affairs	Manfred Stolpe	SPD	L
Federal Minister of Economic Cooperation and Development	Heidemarie Wiecek-Zeul	SPD	P
Federal Minister of Justice	Herta and Paul Amirian Foundation	SPD	P

Sumber: "Schröder II", diperoleh dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6der\\_Cabinet\\_II](http://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6der_Cabinet_II) 16, diakses pada 16 mei 2010 pukul 15.55 WIB.

Jumlah menteri perempuan dalam kabinet Schröder I adalah 6 orang. 5 orang dari SPD dan 1 orang Aliansi 90/Hijau. Jumlah menteri laki-laki adalah 8 orang. Sedangkan Kabinet Merkel I yang berlaku mulai 22 November 2005 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Kabinet Merkel I**

Jabatan	Nama	Partai Politik	Jenis Kelamin
Federal Chancellor	Angela Merkel	CDU	P
Federal Foreign Minister	Dr. Frank-Walter Steinmeier	SPD	L
Federal Minister for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety	Sigmar Gabriel	SPD	L
Federal Minister of Economics and Technology	Michael Glos	CSU	L
Federal Minister of Defence	Dr. Franz Josef Jung	CDU	L
Federal Minister for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth	Dr. Ursula von der Leyen	CDU	P
Federal Minister for Special Tasks and Head of the Chancellery	Dr. Thomas de Maizière	CDU	L
Federal Minister of the Interior	Dr. Wolfgang Schäuble	CDU	L
Federal Minister of Education and Research	Dr. Annette Schavan	CDU	P
Federal Minister of Health	Ulla Schmidt	SPD	P
Federal Minister of Food, Agriculture and Consumer Protection	Horst Seehofer	CSU	L
Federal Minister of Finance	Peer Steinbrück	SPD	L
Federal Minister of Labour and Social Affairs	Olaf Scholz	SPD	L
Federal Minister of Transport, Building and Urban Affairs	Wolfgang Tiefensee	SPD	L
Federal Minister of Economic Cooperation and Development	Heidemarie Wierczorek-Zeul	SPD	P
Federal Minister of Justice	Brigitte Zypries	SPD	P

Sumber: "Cabinet of Germany", diperoleh dari [http://www.search.com/reference/Cabinet of Germany](http://www.search.com/reference/Cabinet_of_Germany), diakses pada 16 Mei 2010 pukul 14.56 WIB.

Dalam kabinet Merkel II terdapat 6 orang menteri perempuan, 3 orang dari CDU dan 3 orang dari SPD, dan 10 orang menteri laki-laki. Adapun Kabinet Merkel II yang berlaku mulai 28 Oktober 2009 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Kabinet Merkel II**

Jabatan	Nama	Partai Politik	Jenis Kelamin
Federal Chancellor	Angela Merkel	CDU	P
Federal Foreign Minister and Vice-Chancellor	Guido Westerwelle	FDP	L
Federal Minister for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety	Norbert Röttgen	CDU	L
Federal Minister of Economics and Technology	Rainer Brüderle	FDP	L
Federal Minister of Defence	Karl-Theodor zu Guttenberg	CSU	L
Federal Minister for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth	Kristina Schröder	CDU	P
Federal Minister for Special Tasks and Head of the Chancellery	Ronald Pofalla	CDU	L
Federal Minister of the Interior	Thomas de Maizière	CDU	L
Federal Minister of Education and Research	Annette Schavan	CDU	P
Federal Minister of Health	Philipp Rösler	FDP	L
Federal Minister of Food, Agriculture and Consumer Protection	Ilse Aigner	CSU	P
Federal Minister of Finance	Wolfgang Schäuble	CDU	L
Federal Minister of Labour and Social Affairs	Ursula von der Leyen	CDU	P
Federal Minister of Transport, Building and Urban Affairs	Peter Ramsauer	CSU	L
Federal Minister of Economic Cooperation and Development	Dirk Niebel	FDP	L
Federal Minister of Justice	Sabine Leutheusser-Schnarrenberger	FDP	P

Sumber: "Merkel II", diperoleh dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet\\_of\\_Germany](http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Germany), diakses pada 16 mei 2010 pukul 15.55 WIB.

Seperti pada dua susunan kabinet sebelumnya, kabinet Merkel II juga beranggotakan 6 orang menteri perempuan. 4 orang berasal dari CDU, 1 orang dari CSU dan 1 orang dari FDP. Sementara jumlah menteri laki-laki adalah 10 orang. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah menteri perempuan dalam kabinet pemerintahan. Merkel tidak membawa perubahan representasi perempuan



dalam kabinet. Perubahan jumlah anggota partai politik dalam kabinet lebih kepada perubahan jumlah kursi (pengaruh) partai yang bersangkutan dalam parlemen, tidak pengaruh apakah perempuan atau laki-laki, karena di dalam parlemen pun tidak ada perubahan jumlah anggota perempuan secara signifikan.

Pada Pemilu 2002 (Schröder II), jumlah anggota parlemen perempuan 32.28%;<sup>29</sup> pada Pemilu 2005 (Merkel I), jumlah anggota parlemen perempuan malah menurun menjadi 31.76%;<sup>30</sup> baru pada hasil Pemilu 2009 (Merkel II), jumlah anggota parlemen perempuan mengalami kenaikan kembali, namun masih kurang signifikan, yaitu sebesar 32.80%.<sup>31</sup> Keberadaan Merkel tidak membawa pengaruh yang signifikan bagi jumlah anggota perempuan di parlemen (*Bundestag*) Jerman.

Inilah proses seleksi dan nominasi dalam partai politik yang bias terhadap perempuan di mana "karakteristik laki-laki" ditekankan dan sering menjadi kriteria dalam menyeleksi kandidat. Lingkungan dan prasangka suatu "old boys club" merintang dan mencegah secara politik kecenderungan perempuan dari keterlibatan dirinya ke dalam kerja partainya.<sup>32</sup> Merkel adalah "anak hasil didikan" Kohl dengan gaya yang patriarkal. Pencapaian keberhasilan Merkel dalam partai maupun Pemilu legislatif bukan semata-mata untuk membawa kepentingan dan membela hak-hak perempuan. Merkel bertindak secara politis di bawah naungan garis-garis ideologis CDU. Merkel tidak bermain dalam arena persaingan politik di Jerman dengan membawa kepentingan politik gender, melainkan kepentingan politik partai. Inilah mengapa *political interest of gender* dari kaum perempuan masih minim terasa hasilnya baik dari program partai politik ataupun produk kebijakan pemerintah. Ruang praktis/aksi di lapangan bagi perjuangan kepentingan perempuan yang

<sup>29</sup> Inter-Parliamentary Union, "Elections Held In 2002: Distribution of seats according to sex", diperoleh dari [http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2121\\_02.htm](http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2121_02.htm) diakses pada 8 Juli 2010 10.30 WIB.

<sup>30</sup> Inter-Parliamentary Union, "Elections Held In 2005: Distribution of seats according to sex", diperoleh dari [http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2121\\_05.htm](http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2121_05.htm) diakses pada 8 Juli 2010 10.30 WIB.

<sup>31</sup> Inter-Parliamentary Union, "Last Elections: Distribution of seats according to sex", diperoleh dari [http://www.ipu.org/english/parline/reports/2121\\_E.htm](http://www.ipu.org/english/parline/reports/2121_E.htm) diakses pada 8 Juli 2010 10.33 WIB.

<sup>32</sup> Nadezdha Shvedova, "Kendala-Kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen" dalam *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hlm. 22.

membawa perumusan kepentingan (*interest*) perempuan yang secara konseptual masih sangat dibatasi. Selama ini rumusan kebijakan publik dan kekuasaan negara belum memperluas pendefinisian kepentingan publik. Di situ belum dimasukkan pembagian masyarakat menurut kegiatan reproduksinya.<sup>33</sup> Merkel, di dalam CDU, pun bertindak berdasarkan garis-garis ideologis partainya, bukan berdasarkan dirinya sebagai seorang perempuan. Merkel belum membawa perubahan yang signifikan, terutama secara statistik, terhadap keanggotaan perempuan dalam partai dan bahkan parlemen.

Padahal, menurut Sulistyati I. Gani, partai politik dapat menjadi wadah bagi kepentingan perempuan, berbagi kekuasaan dengan perempuan. Berbagai alasan pun dikemukakan perihal minimnya keterwakilan perempuan di parlemen yang bisa dicurigai. Pertama, partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Persoalan tidak hanya pada kuantitas tapi juga kualitas calon. Namun minimnya kader perempuan terjadi karena terkait dengan sistem pengaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian, serta peluang pada perempuan. Kedua, parpol mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, apalagi mengajaknya terlibat dalam politik praktis. Pemimpin parpol beralasan, banyak perempuan yang masih alergi dengan politik, karena mereka belum sadar politik. Sebaliknya, perlu ada kecurigaan, bahwa kesadaran politik pada perempuan tidak pernah muncul karena sebenarnya wilayah politik selama ini diklaim sebagai milik laki-laki. Rendahnya kesadaran politik, dengan demikian, bukan hanya kesalahan perempuan, tetapi merupakan kesalahan bersama, terutama kesalahan dalam mendefinisikan kata politik. Makna politik selama ini dipahami sebatas pada cara-cara merebut kekuasaan. Oleh karenanya, berpolitik harus dilakukan melalui cara keras, culas, kotor, manipulatif, dan tega, sehingga politik bukan bidang yang cocok bagi perempuan untuk berkiprah. Perempuan dituntut harus tampil lemah lembut, mengalah demi org lain serta tidak ambisius. Sifat-sifat itu tidak cocok bagi

---

<sup>33</sup> Rebeka dalam Sri Budiyati Wuryaningsih, *Makna Politik Bagi Perempuan, Sebuah Dialektika (Studi tentang Pemaknaan Politik Bagi Aktivitas Perempuan di Partai Politik)*, Skripsi Sarjana Jurusan Sosiologi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1999), hlm. 17.

dunia politik. Akhirnya, ketika ada seorang perempuan bergelut dalam politik, ia menghadapi tantangan lebih keras dibanding laki-laki. Ia tidak hanya harus bersaing dengan laki-laki, tetapi dituntut untuk mengubur mitos bahwa politik adalah dunia laki-laki. Bila tidak, niscaya ia akan terdepak dari panggung politik.<sup>34</sup> Seperti pada pengakuan Otto, bahawa dalam pekerjaan, perempuan harus berusaha lebih keras untuk dapat dipandang, untuk dapat diakui, untuk dapat sejajar dengan laki-laki. Ini pula yang menjadi tantangan bagi Merkel. Merkel harus membuktikan bahwa dirinya sekuat pemimpin negara laki-laki yang lain. Dan Merkel mendapat bekal, yang lebih dari cukup, untuk menghadapi masalah ini dari Helmut Kohl.

Padahal salah satu tugas partai politik adalah menampung semua pendapat dan keinginan rakyat banyak kemudian langkah selanjutnya adalah memilihnya dan merumuskannya serta menyerahkannya kepada pemerintah untuk dapat dijadikan program politik agar diperjuangkan semaksimal mungkin.<sup>35</sup> Di sini berarti bahwa partai politik bertugas dan bertanggung jawab penuh pada kepentingan masyarakat terutama kepentingan perempuan sebagai suara pemilih terbanyak. Namun yang terjadi, Merkel mencapai keberhasilan pada Pemilu 2005 salah satunya adalah demi keberlangsungan CDU sendiri untuk merangkul lebih banyak dukungan suara dalam Pemilu, bukan untuk membela hak-hak kaum perempuan dalam politik.

Identitas personal Merkel tidak penting dibandingkan dengan kekuasaan partai politik terhadap dirinya. Faktor yang penting adalah garis, ide, dan ideologi partai politik karena dalam mengambil keputusan sebagai Kanselir, Merkel tidak dipengaruhi oleh seksualitas. Sejak Tahun 2005, pemerintahan Merkel tidak mempromosikan perempuan lebih baik dari pemerintah lainnya. Pemerintahan Merah-hijau (SPD-Green) malah lebih progresif dalam mempromosikan perempuan dibandingkan pemerintahan Merkel. Contohnya dalam promosi fasilitas publik untuk pendidikan anak, pendidikan anak adalah faktor utama dalam perbedaan perempuan dan laki-laki pada generasi muda, dan kembalinya perempuan ke dalam pasar tenaga kerja. Selama ini, partai politik yang paling ramah kepada anggota perempuan adalah

---

<sup>34</sup> Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 17-18.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

Partai Hijau. Mereka memiliki dua orang presiden, satu laki-laki dan satu lagi perempuan.<sup>36</sup>

Pengaruh yang diberikan Merkel lebih kepada pengaruh simbolik dan lebih bersifat emosional.<sup>37</sup> Contohnya dalam hubungan dengan menteri-mentri perempuan, akan berbeda caranya jika Kanselir adalah laki-laki. Terlebih lagi Merkel adalah seorang Kanselir yang kuat. Hal ini jelas membawa perubahan dalam dunia kerja tidak hanya bagi perempuan namun juga bagi laki-laki.<sup>38</sup>

Merkel telah menjadi salah satu simbol terbaik dari emansipasi perempuan di Jerman. Simbol dari apa yang dapat perempuan capai dan lakukan dalam negara.<sup>39</sup> Merkel telah terpilih dan berhasil menjadi Kanselir meskipun memiliki identitas sebagai seorang perempuan. Merkel membuktikan bahwa perempuan pun bisa mendapat jenis pekerjaan seperti sebagai Kanselir, posisi tertinggi dalam negara.<sup>40</sup> Sebuah pertanda yang jelas membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi apapun, mencapai apapun, dan melakukan apapun yang mereka mau.<sup>41</sup>

Memang bukan berarti Merkel yang membuat perubahan kondisi status perempuan dalam masyarakat.<sup>42</sup> Terdapat kampanye emansipasi perempuan yang tengah berjalan. Telah terjadi diskriminasi di masa lalu, tapi hal itu telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Perubahan ini merupakan proses dan perkembangan yang konstan dan tidak ada hubungannya dengan Merkel. Perkembangan ini tetap berjalan dengan atau tanpa dia. Kebetulan saja dia terpilih sebagai Kanselir di tengah perubahan ini.<sup>43</sup> Merkel memang Kanselir perempuan

---

<sup>36</sup> Wawancara Mendalam dalam Philipp Kaupert, Wakil Direktur Lokal Friedrich Ebert-Stiftung Jakarta, 21 April 2010.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Wawancara Mendalam dengan Gabriele Otto, Staf Pengajar Program Studi Jerman FIB UI, 31 Maret 2010.

<sup>39</sup> Wawancara Mendalam dengan Guido Schnieder, Anggota DAAD, 31 Maret 2010.

<sup>40</sup> Otto, *Op. Cit.*

<sup>41</sup> Schnieder, *Op. Cit.*

<sup>42</sup> Otto, *Op. Cit.*

<sup>43</sup> Schnieder, *Op. Cit.*

pertama, tapi bukan politisi perempuan pertama.<sup>44</sup> Perubahan ini datang karena waktunya telah tiba dan masyarakat telah siap.<sup>45</sup>

Namun tak dapat ditiadakan bahwa Merkel adalah katalisator dari proses perkembangan perempuan di Jerman, bagian dari proses emansipasi perempuan yang sedang berjalan, bukan penentu apalagi pencipta proses itu. Kurangnya kepercayaan dalam diri kaum perempuan adalah salah satu alasan utama bagi tidak terwakilinya perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal, termasuk parlemen, pemerintahan, dan partai-partai politik.<sup>46</sup> Untuk itu, Merkel berperan besar memberikan keberanian bagi kaum perempuan bahwa perempuan pun bisa, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi sukses.<sup>47</sup> Merkel memberi contoh satu prestasi yang luar biasa bagi seorang perempuan. Hal ini dapat memotivasi dan memberikan keberanian bagi para perempuan lain untuk melakukan hal yang sama pada diri mereka, untuk mencapai pekerjaan yang lebih baik. Jika Merkel bisa, maka perempuan lain tentu juga bisa. Merkel membantu perubahan kondisi antara perempuan dan laki-laki di Jerman berjalan dengan lebih cepat dibandingkan jika Kanselir adalah seorang laki-laki.<sup>48</sup>

Satu hal menarik yang diingat oleh salah satu informan perempuan, Otto, adalah bahwa terdapat perubahan dalam gaya foto-foto yang beredar di surat kabar sebelum dan sesudah Merkel terpilih. Sebelumnya, Merkel hanyalah seorang perempuan yang tidak diperlihatkan secara cukup bagus dibandingkan dengan kandidat lain yang adalah seorang laki-laki dalam suatu foto di surat kabar. Setelah terpilih, foto-foto diri Merkel di dalam surat kabar menjadi lebih bagus, atraktif, dan glamor.<sup>49</sup> Di samping karena telah terpilih sebagai Kanselir, perubahan ini seakan membuat Merkel lebih dihormati sebagai seorang perempuan daripada sebelum terpilih.

---

<sup>44</sup> Bernd Nestler, Pegawai PT Clariant Indonesia, 1 April 2010.

<sup>45</sup> Otto, *Op. Cit.*

<sup>46</sup> Nadezdha Shvedova, *Kendala-Kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen dalam Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hlm. 31.

<sup>47</sup> Schnieder, *Op. Cit.*

<sup>48</sup> Otto, *Op. Cit.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Sementara itu, berkaitan dengan penampilan Jerman di mata internasional, Jerman terlihat lebih modern memiliki perempuan di tengah para pemimpin laki-laki negara Eropa lainnya. Dalam sebuah foto di surat kabar, Merkel terlihat bersinar dan menarik, dengan gaun merah, di tengah-tengah para pemimpin Eropa laki-laki yang memakai setelan hitam. Merkel terlihat sungguh berbeda dan penuh kekuatan sebagai perempuan pertama dari satu negara yang penting di dunia barat. Begitu juga saat Merkel melakukan kunjungan Negara ke Arab Saudi, ia tidak harus berpakaian dengan cara perempuan lokal. Merkel tetap berpakaian dengan caranya meskipun menimbulkan aksi protes dari masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Namun di situlah terlihat kekuatannya dalam mewakili Jerman. Salah satu informan dalam skripsi ini, Guido Schnieder mengaku merasa bangga bahwa negaranya direpresentasikan oleh seorang perempuan. Dibandingkan dengan, contohnya, Amerika Serikat yang meskipun telah memilih kulit hitam, namun tetap saja Obama itu adalah seorang laki-laki. Hal ini membawa Jerman ke posisi yang lebih tinggi dan lebih modern, dimana pemimpin tidak lagi harus selalu laki-laki.<sup>50</sup>

Sejak 2005, Merkel selalu menempati peringkat teratas versi Forbes. Merkel, yang juga berstatus sebagai perempuan pertama yang memimpin Jerman sebagai Kanselir (kepala pemerintah) dianggap berhasil mempertahankan status Jerman sebagai negara ekonomi terkuat di Eropa. Forbes menentukan peringkat dalam daftar Top 100 tersebut menggunakan pemberitaan media dan dampak finansial sebagai tolok ukur. Angela Merkel kemudian dipandang sebagai perempuan paling berpengaruh di dunia. Demikian menurut majalah bisnis dan politik terkemuka, Forbes, saat mengumumkan daftar "100 Perempuan Berpengaruh 2009" pada Rabu 19 Agustus 2009,<sup>51</sup> ketika untuk keempat kalinya berturut-turut, majalah ekonomi Amerika Serikat ini menempatkan Angela Merkel sebagai perempuan yang paling

---

<sup>50</sup> Schnieder, *Op. Cit.*

<sup>51</sup> Renne R.A Kawilarang dan Harriska Farida Adiati, "Angela Merkel Tetap Perempuan No.1 di Dunia: Sejak 2005, Kanselir Jerman itu menempati posisi pertama dalam daftar versi majalah Forbes," diperoleh dari [http://us.dunia.vivanews.com/news/read/84084-angela\\_merkel\\_tetap\\_perempuan\\_no\\_1\\_di\\_dunia](http://us.dunia.vivanews.com/news/read/84084-angela_merkel_tetap_perempuan_no_1_di_dunia) diakses pada 28 Agustus 2009 pukul 11:36 WIB.

berkuasa di dunia. Ia juga, satu-satunya warga Jerman dalam daftar 100 orang paling berkuasa itu.<sup>52</sup>

#### **IV.2.1.2.2 Angela Merkel Seorang Jerman Timur dan Partai Politik CDU di Jerman Barat**

Dalam klasifikasi Maurice Duverger, sistem kepartaian Jerman tergolong sistem dwi-partai. Sistem dwi-partai bersaing merupakan suatu sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat dua partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kewenangan memerintah melalui Pemilihan Umum.<sup>53</sup> Persaingan kampanye menjelang Pemilu 2005 Jerman terpusat pada dua partai besar CDU dan SPD, yang akan memiliki partai kecil lain sebagai mitra koalisi masing-masing.

Sistem dwi-partai ini dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah.<sup>54</sup> CDU dan SPD memiliki basis massa tersendiri. Wilayah dukungan untuk masing-masing partai terbentuk dari kesenjangan antara masyarakat Jerman Barat dan Jerman Timur, sebagai peninggalan sejarah yang masih berlangsung pada saat Pemilu tahun 2005 diselenggarakan. Warisan masa lalu yang telah membentuk karakter dasar kedua bagian Jerman, membedakan mental, cara berpikir, bahkan keputusan politik masyarakat. Masing-masing kelompok masyarakat, Timur maupun Barat memiliki asas dan tujuan sosial politik yang berbeda tajam. Wilayah Jerman Barat mendukung partai Kristen Demokrat, CDU, yang melindungi kelas pengusaha dengan nilai-nilai Neo-liberal. Sementara masyarakat Jerman Timur adalah pendukung SPD yang melindungi kelas pekerja dengan nilai-nilai Sosial Demokratnya. Perbedaan inilah yang menjadi dasar identifikasi kedua partai politik utama di Jerman. Identifikasi

---

<sup>52</sup> Edith Koesoemawiria, "Pemilu Jerman: Potret Kanselir Jerman Angela Merkel," diperoleh dari <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4603377,00.html> diakses pada 06 September 2009 pukul 14.16 WIB.

<sup>53</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hlm. 126.

<sup>54</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 417.

terhadap partai politik inilah yang mempengaruhi masyarakat kedua wilayah Jerman untuk menentukan pilihan politiknya saat Pemilu.

Kesenjangan kedua identitas Jerman ini juga ditemukan dalam diri Merkel. Meskipun rata-rata informan tidak memperlakukan identitas Merkel sebagai orang (bekas) Jerman Timur, salah satu informan dari Jerman Barat, Bernd Nestler, masih bersikap skeptis akan masa lalunya sebagai mantan aktivis FDJ (organisasi pemuda partai komunis), yang dianggap masih patut dipertanyakan.<sup>55</sup> Di salah satu kawasan barat Jerman, Merkel dianggap sebagai penyusup dari Jerman Timur. Banyak poster kampanyenya dicoret dengan sindiran '*Honecker's Revenge*' merujuk pada mantan diktator terakhir Jerman Timur, Erich Honecker. Meskipun sebenarnya kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada figur politik masing-masing partai karena performa dalam pemilu adalah prestasi kolektif.<sup>56</sup> Hal ini menunjukkan bahwa prasangka-prasangka, sebagai peninggalan masa lalu, terhadap bagian Jerman tertentu itu masih hidup. Ada identifikasi akan suatu identitas masyarakat yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan khusus untuk membedakan kedua Jerman, bahkan sampai kepada pilihan politik masyarakat.

Masyarakat Jerman Timur, yang (bekas) sosialis, cenderung mendukung partai Kiri seperti SPD dan masyarakat Jerman Barat, yang lebih demokratis, akan mendukung CDU/CSU. Namun uniknya pada tahun 2005, ada sosok Merkel dengan identitas personal yang bertentangan dengan identifikasi partai politik yang telah terbentuk. Merkel adalah seorang Timur yang marginal, yang masuk ke dalam Partai politik yang berkuasa di Jerman Barat. Menjadi menarik untuk melihat bagaimana pengaruh Merkel dalam merangkul suara orang Jerman Timur, ataupun Jerman Barat dalam Pemilihan Umum untuk CDU, yang memiliki basis massa di Jerman Barat. Apakah identifikasi terhadap identitas personal Merkel dapat mempengaruhi identifikasi partai politik yang telah berakar dalam masyarakat kedua Jerman.

Untuk itu, kita dapat melihat perbandingan dari kedua hasil Pemilihan Umum pada tahun 2002 dan 2005. Total hasil Pemilu 22 September 2002 untuk daerah

<sup>55</sup> Wawancara Mendalam dengan Bernd Nestler, Pegawai PT Clariant Indonesia, 1 April 2010.

<sup>56</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, "Seputar Pemilu Legislatif Jerman 2005," ('s-Gravenhage, 23 September 2005) diperoleh dari <http://indocase.nl> diakses pada 14 September 2009 pukul 11.03 WIB.



Jerman Barat, tidak termasuk Berlin Barat, dengan jumlah pemilih terdaftar 47,830,715 orang dan jumlah pemilih sebanyak 80.7%-nya atau sejumlah 38,588,177 orang, dapat dilihat sebagai berikut:<sup>57</sup>

**Tabel 4.4 Hasil Total Pemilu 2002 Jerman Barat (tidak termasuk Berlin Barat)**

Party	First Votes	%	Direct Seats	Second Votes	%	List Seats	Total Seats
Christian Democratic Union/Christian Social Union	16,621,269	43.7	109	15,654,195	41.0	100	209
Christian Democratic Union (CDU)	12,310,091	32.4	66	11,339,115	29.7	85	151
Christian Social Union (CSU)	4,311,178	11.3	43	4,315,080	11.3	15	58
Social Democratic Party of Germany (SPD)	16,205,767	42.6	124	14,631,785	38.3	72	196
Alliance 90/The Greens	2,231,874	5.9	0	3,503,499	9.2	46	46
Free Democratic Party (F.D.P.)	2,159,131	5.7	0	2,892,402	7.6	39	39
Party of Democratic Socialism (PDS)	378,855	1	0	411,762	1.1	0	0
Schill Party for Germany	98,094	0.3	0	273,976	0.7	0	0
The Republicans	48,073	0.1	0	227,489	0.6	0	0
Others	282,477	0.7	0	562,249	1.5	0	0

Sumber: "Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup", diperoleh dari

<http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2002&land=GW> diakses pada 11 Mei 2010 pukul 20.57 WIB.

<sup>57</sup> Manuel Álvarez Rivera, "Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup," diperoleh dari

<http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2002&land=GW> diakses pada 11 Mei 2010 pukul 20.57 WIB.

Untuk hasil Pemilu Jerman Barat yang termasuk Berlin Barat, dengan jumlah pemilih terdaftar 49,278,532 orang dan jumlah pemilih sebanyak 80.6%-nya atau sejumlah 39,733,112 orang, adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

**Tabel 4.5 Hasil Total Pemilu 2002 Jerman Barat (termasuk Berlin Barat)**

Party	First Votes	%	Second Votes	%
Christian Democratic Union/Christian Social Union	17,015,761	43.5	16,019,893	40.8
Christian Democratic Union (CDU)	12,704,583	32.4	11,704,813	29.8
Christian Social Union (CSU)	4,311,178	11	4,315,080	11
Social Democratic Party of Germany (SPD)	16,664,020	42.6	15,028,217	38.3
Alliance 90/The Greens	2,379,505	6.1	3,699,206	9.4
Free Democratic Party (F.D.P.)	2,230,411	5.7	2,982,514	7.6
Party of Democratic Socialism (PDS)	407,487	1	442,136	1.1
Schill Party for Germany	100,089	0.3	294,287	0.7
The Republicans	51,134	0.1	235,114	0.6
Others	303,634	0.8	585,762	1.5

Sumber: "Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup", diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2002&land=GW> diakses pada 11 Mei 2010 pukul 20.57 WIB.

Sementara untuk Hasil Pemilu Bundestag 18 September 2005 di Jerman Barat, tidak termasuk Berlin Barat, dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 48,277,447 orang dan total jumlah pemilih adalah 78.5%-nya yaitu 37,895,835 orang, sebagai berikut:<sup>59</sup>

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Manuel Álvarez Rivera, "Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup," diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2005&land=GW>, diakses pada 28 April 2010, pukul 17.10 WIB.

**Tabel 4.6 Hasil Total Pemilu Bundestag Jerman 2005 –Jerman Barat (tidak termasuk Berlin Barat)**

Party	First Votes	%	Direct Seats	Second Votes	%	List Seats	Total Seats
Christian Democratic Union/Christian Social Union	16,357,774	43.9	129	14,081,204	37.7	60	189
Christian Democratic Union (CDU)	12,467,784	33.5	85	10,586,895	28.4	58	143
Christian Social Union (CSU)	3,889,990	10.4	44	3,494,309	9.4	2	46
Social Democratic Party of Germany (SPD)	14,878,203	39.9	105	13,122,978	35.2	71	176
Free Democratic Party (F.D.P.)	1,707,675	4.6	0	3,824,415	10.2	50	50
The Left Party	2,044,524	5.5	0	3,208,176	8.6	42	42
Alliance 90/The Greens	1,459,916	3.9	0	1,795,917	4.8	24	24
National Democratic Party of Germany (NPD)	510,430	1.4	0	417,812	1.1	0	0
The Republicans	28,416	0.1	0	228,251	0.6	0	0
Others	259,094	0.7	0	643,846	1.7	0	0

Sumber: *Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup*, diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2005&land=GW>, diakses pada 28 April 2010, pukul 17.10 WIB.

Sedangkan untuk hasil Pemilu 2005 di Jerman Barat yang termasuk Berlin Barat, dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 49,704,562 orang dan total jumlah pemilih adalah 78.5%-nya yaitu 39,008,851 orang, sebagai berikut:<sup>60</sup>

<sup>60</sup> *Ibid.*

**Tabel 4.7 Hasil Total Pemilu Bundestag Jerman 2005 – Jerman Barat  
(termasuk Berlin Barat)**

Party	First Votes	%	Second Votes	%
Christian Democratic Union/Christian Social Union	16,727,210	43.6	14,385,963	37.4
Christian Democratic Union (CDU)	12,837,220	33.5	10,891,654	28.4
Christian Social Union (CSU)	3,889,990	10.1	3,494,309	9.1
Social Democratic Party of Germany (SPD)	15,313,459	39.9	13,494,029	35.1
Free Democratic Party (F.D.P.)	1,756,435	4.6	3,936,002	10.2
The Left Party	2,188,898	5.7	3,379,648	8.8
Alliance 90/The Greens	1,517,946	4	1,874,397	4.9
National Democratic Party of Germany (NPD)	523,783	1.4	429,476	1.1
The Republicans	32,593	0.1	234,975	0.6
Others	275,388	0.7	681,523	1.8

Sumber: *Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup*, diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2005&land=GW>, diakses pada 28 April 2010, pukul 17.10 WIB.

Terlihat bahwa pada tahun 2002 ataupun dengan kemunculan Merkel pada tahun 2005, CDU/CSU tetap menduduki posisi tertinggi di Jerman Barat dengan perolehan suara tidak banyak mengalami perubahan: 43,5% pada suara pertama dan 40,8% pada suara kedua pada tahun 2002; dan 43,6% pada suara pertama dan 37,4% pada suara kedua pada tahun 2005. Suara Jerman Barat untuk CDU/CSU terbilang stabil, dengan atau tanpa Merkel. Penurunan suara kedua pada tahun 2005 pun tidak terkait dengan identitas Merkel. Merkel berada dalam partai politik yang memiliki akar rumput yang kuat di Jerman Barat. Pemilih mendapat pengaruh dari faktor identifikasi partai politik ini. CDU telah memimpin sekian lama di Jerman Barat.<sup>61</sup>

Terlebih lagi, Merkel tidak dipandang sebagai orang “Timur” karena sikapnya yang sudah lebih modern dan terbuka. Dalam hal pembuatan kebijakan pun, Merkel lebih bersikap pro terhadap Barat dan Amerika dibandingkan dengan Schröder.<sup>62</sup> Kebijakan luar negeri Merkel tidak dikarakterisasi oleh gaya Jerman Timur. Merkel

<sup>61</sup> Wawancara Mendalam dengan Guido Schnieder, Anggota DAAD, 31 Maret 2010.

<sup>62</sup> Wawancara Mendalam dengan Philipp Kaupert, Wakil Direktur Lokal Friedrich Ebert-Stiftung Jakarta, 21 April 2010.

lebih pro terhadap barat jika mempertimbangkan bahwa orang Jerman Timur akan lebih pro kepada Eropa Timur dan negara-negara (bekas) komunis. Karena Merkel mengikuti garis politik dari partainya (CDU) yang lebih pro kepada Barat, Amerika, dan cara-cara liberal. Sementara bisa dikatakan bahwa pemerintahan Schröder justru lebih bergaya “Timur” daripada pemerintahan Merkel. Kedua belah pihak juga berbeda mengenai arah Jerman di dunia. Schröder memelihara hubungan dengan Rusia dan Negara-negara Eropa Timur dalam Uni Eropa. Schröder telah bergabung dengan Perancis dalam usaha untuk melawan dominasi AS secara global, sedangkan Merkel mengatakan ia akan berbaikan dengan Washington.<sup>63</sup>

Paska terpilihnya Merkel sebagai Kanselir pada pemilu 2005, Merkel mendapat FP memo(memorandum) dari William Drozdiak, yang tidak lain adalah Presiden dari *American Council* di Jerman. Memo tersebut berisikan instruksi-instruksi untuk Merkel lakukan dalam menjalankan pemerintahannya, antara lain adalah mengenai kebijakan pekerja sampai usia 60 tahun; pemberian jumlah bagian dalam kabinet Merkel kepada Sosial-Demokrat yang merupakan langkah cerdas; untuk lebih membuka diri kepada Uni Eropa; Menteri Luar Negeri adalah satu batu sandaran penting yang harus stabil dalam pemerintahan dan Frank-Walter Steinmeier, yang secara luas dihormati sebagai administrator yang efektif dari Sosial Demokrat, dapat menjadi senjata rahasia dalam pemerintahan Merkel; dan juga saran untuk lebih kuat menghadapi Putin dan Rusia serta memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Dibandingkan dengan Schröder, yang memiliki hubungan buruk dengan Bush dalam masalah perang Irak, Merkel telah bersikap lebih ramah terhadap *White House*.<sup>64</sup>

Maka dapat dilihat, Figur Merkel, yang berkaitan dengan identitasnya sebagai orang Jerman Timur tidak mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.<sup>65</sup> Terutama perolehan suara CDU di Jerman Barat. Merkel tidak memosisikan dirinya sebagai

---

<sup>63</sup> Kaupert, *Op. Cit.*

<sup>64</sup> Drozdiak, “Creating a Merkel Miracle” dalam *Foreign Policy*, No. 152, *Washingtonpost.Newsweek Interactive, LLC* (2006), hlm. 68-71, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/25461993> (Jstor) database, diakses pada 19 April 2010 pukul 15.45 WIB.

<sup>65</sup> Schnieder, *Op. Cit.*

orang (bekas) Jerman Barat. Dalam berpolitik, Merkel tetap mengikuti nilai-nilai dan garis-garis politik partainya, CDU.

Sedangkan pada Pemilu 2005, terjadi perubahan perolehan suara dari dua parati utama di Jerman. Total hasil Pemilu pada 22 September 2002 di Jerman Timur, yang tidak termasuk Berlin Timur, dengan jumlah pemilih terdaftar 11,159,358 orang dan jumlah pemilih adalah 72.6%-nya yaitu 8,098,268 orang, dapat dilihat sebagai berikut:<sup>66</sup>

**Tabel 4.8 Hasil Total Pemilu Bundestag 2002 – Jerman Timur (tidak termasuk Berlin Timur)**

Party	First Votes	%	Direct Seats	Second Votes	%	List Seats	Total Seats
Social Democratic Party of Germany (SPD)	3,126,394	39.3	38	3,171,713	39.8	8	46
Christian Democratic Union (CDU)	2,509,550	31.6	16	2,344,429	29.4	17	33
Free Democratic Party (F.D.P.)	495,005	6.2	0	522,409	6.6	6	6
Alliance 90/The Greens	256,608	3.2	0	332,848	4.2	5	5
Party of Democratic Socialism (PDS)	1,430,249	18.0	0	1,292,298	16.2	0	0
Schill Party for Germany	19,650	0.2	0	92,019	1.2	0	0
The Republicans	4,504	0.1	0	40,414	0.5	0	0
Others	106,870	1.3	0	170,860	2.1	0	0

Sumber: "Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup", diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2002&land=GO> diakses pada 11 Mei 2010 pukul 20.57 WIB.

<sup>66</sup> Manuel Álvarez Rivera, "Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup", diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2002&land=GO> diakses pada 11 Mei 2010 pukul 20.57 WIB.

Sedangkan hasil total Pemilu 2005 di Jerman Timur, yang termasuk Berlin Timur, dengan jumlah pemilih terdaftar 12,154,336 orang dan jumlah pemilih 72.8%-nya yaitu 8,849,649 orang, adalah: <sup>67</sup>

**Tabel 4.9 Hasil Total Pemilu Bundestag Jerman 2002 –Jerman Timur  
(termasuk Berlin Timur)**

Party	First Votes	%	Second Votes	%
Social Democratic Party of Germany (SPD)	3,395,947	39.1	3,460,451	39.7
Christian Democratic Union (CDU)	2,631,929	30.3	2,462,748	28.3
Party of Democratic Socialism (PDS)	1,671,716	19.2	1,474,566	16.9
Free Democratic Party (F.D.P.)	522,385	6	556,301	6.4
Alliance 90/The Greens	314,289	3.6	411,149	4.7
Schill Party for Germany	20,241	0.2	106,189	1.2
The Republicans	4,813	0.1	45,557	0.5
Others	128,363	1.5	192,390	2.2

Sumber: “Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup”, diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2002&land=GO> diakses pada 11 Mei 2010 pukul 20.57 WIB.

Hasil Pemilu 18 September 2005 untuk Jerman timur, tidak termasuk Berlin Timur, dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 11,154,362 orang dan jumlah pemilih 74.0%-nya yaitu 8,260,902 orang, dapat dilihat sebagai berikut: <sup>68</sup>

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Manuel Álvarez Rivera, “Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup,” diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2005&land=GO> diakses pada 28 April 2010 pukul 15.28.

**Tabel 4.10 Hasil Total Pemilu Bundestag Jerman 2005 –Jerman Timur (tidak termasuk Berlin Timur)**

Party	First Votes	%	Direct Seats	Second Votes	%	List Seats	Total Seats
Social Democratic Party of Germany (SPD)	2,569,306	31.7	33	2,434,013	30	5	38
Christian Democratic Union (CDU)	2,440,152	30.1	20	2,141,130	26.4	12	32
The Left Party	1,982,538	24.5	0	2,018,647	24.9	26	26
Free Democratic Party (F.D.P.)	430,385	5.3	0	671,572	8.3	9	9
Alliance 90/The Greens	264,540	3.3	0	375,604	4.6	6	6
National Democratic Party of Germany (NPD)	313,839	3.9	0	301,686	3.7	0	0
The Republicans	5,900	0.1	0	27,903	0.3	0	0
Others	90,102	1.1	0	138,198	1.7	0	0

Sumber: "Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup", diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2005&land=GO> diakses pada 28 April 2010 pukul 15.28.

Sedangkan hasil Pemilu 18 September 2005 untuk Jerman timur, yang termasuk Berlin Timur, dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 12,166,149 orang dan jumlah pemilih 74.3%-nya yaitu 9,035,283 orang, dapat dilihat sebagai berikut:<sup>69</sup>

<sup>69</sup> *Ibid.*



**Tabel 4.11 Hasil Total Pemilu Bundestag Jerman 2005 – Jerman Timur  
(termasuk Berlin Timur)**

Party	First Votes	%	Second Votes	%
Social Democratic Party of Germany (SPD)	2,815,641	31.8	2,700,636	30.4
Christian Democratic Union (CDU)	2,553,730	28.8	2,245,086	25.3
The Left Party	2,246,222	25.4	2,243,797	25.3
Free Democratic Party (F.D.P.)	452,096	5.1	712,142	8
Alliance 90/The Greens	350,015	4	458,678	5.2
National Democratic Party of Germany (NPD)	333,994	3.8	319,092	3.6
The Republicans	6,085	0.1	31,126	0.4
Others	100,567	1.1	161,418	1.8

Sumber: “Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag - Results Lookup”, diperoleh dari <http://electionresources.org/de/bundestag.php?election=2005&land=GO> diakses pada 28 April 2010 pukul 15.28.

Dari data hasil Pemilu di atas, baik untuk Jerman Barat maupun Jerman Timur, terlihat bahwa memang mayoritas suara di (bekas) Jerman Barat adalah untuk CDU/CSU, dan di (bekas) Jerman Timur untuk SPD.<sup>70</sup> Identifikasi partai politik yang telah terbangun, sebagai kontinuitas sejarah dan identifikasi identitas kedua masyarakat wilayah Jerman, merupakan karakteristik stabil yang ditemukan dalam suatu penyelenggaraan Pemilu. Pemilih menggunakan identifikasi partai ini sebagai pertimbangan untuk menjadi partisan partai politik tertentu. Masyarakat wilayah Jerman barat adalah partisan yang loyal terhadap partai CDU/CSU, begitupun sebaliknya dengan masyarakat wilayah Jerman Timur yang merupakan partisan loyal terhadap SPD. Pada tahun 2005, sebenarnya rakyat Jerman memperingati 15 tahun reunifikasi. Namun, hasil Pemilu menunjukkan bahwa warga Jerman masih terbelah dan terpisah oleh kesenjangan yang besar antara satu sama lain.

Meskipun Merkel adalah orang Jerman Timur, namun terlihat bahwa fakta ini pun tidak merubah, secara signifikan, basis pemilih kedua blok kekuatan politik

<sup>70</sup> Michael Barone, “Germany's election results point to a big win for the center-right” dalam *Beltway Confidential The Examiner* (2009), diperoleh dari <http://www.washingtonexaminer.com/opinion/blogs/beltway-confidential/Germanys-election-is-a-big-win-for-the-center-right-merkel-christian-democrats-greens-left-fdp.html>, diakses pada 28 September 2009 pukul 14.05 WIB.

utama yang memang telah terbangun bertahun-tahun. Faktor identifikasi partai politik lebih determinan daripada identifikasi terhadap identitas kandidat sebagai individu. Lagipula, lompatan besar Merkel “dari Timur ke Barat” tidak membuatnya menjadi figur yang mudah “diterima”. Menurut *Der Spiegel* (Nomor 4/2005), Merkel tetaplah “orang asing”. Merkel dipandang terlalu Timur bagi penduduk di Barat dan terlalu Barat bagi penduduk di Timur.<sup>71</sup> Di bekas Jerman Timur, pemilih banyak yang ragu atas kemampuannya menggantikan Schröder dan Merkel dinilai kurang merakyat.<sup>72</sup>

Oleh karena itu, Nestler memperkirakan bahwa sebelum Pemilu ini, identitas mungkin adalah kelebihan untuk Merkel di Jerman Timur. Beberapa orang Jerman Timur merasa bangga terhadapnya sebelum Pemilu berlangsung. Namun tidak lagi di kemudian hari (setelah Pemilu).<sup>73</sup> Pada awalnya, bagi kelompok Timur yang dinilai terbiasa tidak aktif ataupun pasif itu, kemenangan Merkel sebagai Kanselir dapat menjadi sesuatu yang “aktif” bagi kelompok Timur. Maka, memang mungkin untuk masyarakat (bekas) Jerman Timur ini untuk mendukung Merkel menjadi Kanselir.<sup>74</sup> Namun setelah melihat sikap politik dan sifat produk kebijakannya, pilihan politik menjadi tergantung pada identitas politik. CDU lebih untuk para pendukung komunitas bisnis, dengan pendekatan pro-bisnis pula. SPD untuk kelas pekerja, bersikap pro terhadap persatuan perdagangan dan pro terhadap pendekatan yang sosial-inklusif. Dan jika seseorang, di Timur, berasal dari komunitas bisnis, maka ia akan bangga terhadap Merkel, yang berasal dari Timur dan memimpin partai yang pro-bisnis. Sementara jika seseorang lain pro terhadap aktivis sosial dan persatuan tenaga kerja, meskipun dia berasal dari Timur, dia tidak akan bangga kepada Merkel.<sup>75</sup>

Terlepas dari itu, pada Pemilu tahun 2005, peta kekuatan politik Jerman berubah. Hasil Pemilu 2005 di Jerman Timur memperlihatkan adanya penurunan

<sup>71</sup> Myrna Ratna, “Sosok Angela Merkel: Sang Kanselir,” *Kompas*, 11 Oktober 2005, hlm.16.

<sup>72</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, “Seputar Pemilu Legislatif Jerman 2005,” (‘s-Gravenhage, 23 September 2005) diperoleh dari <http://indocase.nl> diakses pada 14 September 2009 pukul 11.03 WIB.

<sup>73</sup> Wawancara Mendalam dengan Bernd Nestler, Pegawai PT Clariant Indonesia, 1 April 2010.

<sup>74</sup> Wawancara Mendalam dengan Gabriele Otto, Staf Pengajar Program Studi Jerman FIB UI, 31 Maret 2010.

<sup>75</sup> Wawancara Mendalam dengan Philipp Kaupert, Wakil Direktur Lokal Friedrich Ebert-Stiftung Jakarta, 21 April 2010.

perolehan suara untuk SPD di wilayah basis massanya sendiri (Jerman Timur): 39,1% suara pertama dan 39,7% suara kedua pada tahun 2002 sedangkan tahun 2005 menurun menjadi 31,8% untuk suara pertama dan 30,4% untuk suara kedua. Namun bukan berarti penurunan suara SPD ini diikuti oleh peningkatan suara CDU di Jerman Timur. CDU juga mengalami penurunan suara: 30,3% suara pertama dan 28,3% suara kedua pada tahun 2002 menurun menjadi 28,8% suara pertama dan 25,3% suara kedua pada tahun 2005.

Penurunan suara kedua partai utama ini disebabkan berubahnya kekuatan politik pada tahun 2005. Perubahan ini juga menghasilkan kekuatan politik baru dari kelompok Kiri: *Left Party (Die Linke)* yang memperoleh 25,4% suara pertama dan 25,3% suara kedua pada Pemilu 2005 di Jerman Timur. *Die Linke* berhasil memperoleh suara yang cukup tinggi ini, dibandingkan di Jerman Barat hanya memperoleh 5,7% suara pertama dan 8,8% suara kedua, karena *Die Linke* adalah pecahan dari basis massa SPD yang kecewa terhadap perubahan kebijakan pemerintahan Schröder.

Sistem dwi-partai membatasi jalan bagi partisan suatu partai untuk dapat mengekspresikan kekecewaan terhadap partainya melalui perilaku memilih (suara).<sup>76</sup> Namun dengan munculnya kekuatan ketiga, *Die Linke*, sebagai pecahan dari sayap Kiri, membuat basis massa Jerman Timur, yang semula adalah partisan loyal dari SPD, memiliki alternatif pilihan. *Die Linke* diidentifikasi sebagai partai Kiri baru yang dapat mengobati kekecewaan mereka atas SPD.

Oleh karena itu dapat dilihat dalam kasus ini, Merkel tidak membawa pengaruh perubahan suara dari Timur maupun Barat terhadap CDU, pun Merkel tidak membawa perubahan permasalahan kesenjangan identitas sosial antara Timur dan Barat di Jerman paska Pemilu 2005. Perbedaan Timur-Barat akan lenyap seiring dengan waktu.<sup>77</sup> Pemilu dan kemenangan Merkel tidak mengubah apa-apa.<sup>78</sup> Kaupert

---

<sup>76</sup> Nichole Bauer, "Sticking With It: How Loyalty Explains Political Party Identification" dalam *Y673 Mini Conference Paper* (Spring 2010), p. 1-2, diperoleh dari [http://www.indiana.edu/~workshop/publications/materials/conference\\_papers/Y673\\_Bauer.pdf](http://www.indiana.edu/~workshop/publications/materials/conference_papers/Y673_Bauer.pdf) diakses pada 11 Juli 2010 pukul 23.00 WIB.

<sup>77</sup> Nestler, *Op. Cit.*

mengakui bahwa sulit bagi satu orang untuk memberi pengaruh sebesar itu. Proses reunifikasi belum berakhir dan memang memerlukan waktu yang lama. Modal dasar dari perubahan ini adalah perkembangan faktor sosial ekonomi daripada perbedaan sosial antara dua regional. Perilaku kultural, sebagai bagian lain, akan mengikuti perkembangan ini.<sup>79</sup>

Dari kedua pembahasan mengenai persoalan identitas di atas, Hal ini masih terjadi bahkan pada demokrasi yang sudah mapan. Tingkat representasi perempuan yang rendah di beberapa parlemen Eropa menjadi alasan adanya pelanggaran hak-hak demokratik fundamental perempuan, seperti seperti terhadap hak-hak asasi dasar mereka. Tingkat representasi yang tidak setara dalam badan legislatif mengartikan bahwa representasi perempuan, yang sepatutnya menjadi suatu fungsi bagi demokratisasi, ternyata lebih berfungsi untuk mempertahankan status quo.<sup>80</sup> Seperti halnya Merkel, seorang pemimpin yang dimiliki CDU yang bertujuan untuk membawa modernisasi ke dalam partai sekaligus memperbagus citra partai untuk masyarakat pemilih.

Bagi perempuan, untuk terpilih dalam parlemen, harus melalui tiga rintangan krusial: pertama, seorang perempuan perlu menseleksi dirinya sendiri untuk pencalonan; kedua, seorang perempuan perlu diseleksi sebagai kandidat oleh partai; dan ketiga, kemudian perlu diseleksi oleh pemilih.<sup>81</sup> Untuk menghadapi rintangan pertama dan kedua, Merkel mendapat bantuan dan dukungan yang sangat besar dari Helmut Kohl, bagaimana Kohl merekrut langsung Merkel ke dalam partai, memberikan dukungan, pelatihan, pengajaran, pembekalan, dan pembangunan kepercayaan diri sendiri untuk Merkel di dalam CDU.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Kaupert, *Op. Cit.*

<sup>80</sup> Nadezdha Shvedova, "Kendala-Kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen" dalam Azza Karam, *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hlm. 18.

<sup>81</sup> Richard E Matland, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan" dalam Azza Karam, *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hlm. 62.

Sedangkan untuk rintangan yang ketiga, Merkel benar-benar ada di balik citra CDU sebagai partai besar di Jerman Barat. Menjelang pemilu, Merkel tidak dilihat sebagai individu, namun lebih dilihat sebagai calon dari sebuah partai politik besar di Jerman yaitu CDU. Citra CDU sebagai partai Kristen Demokrat yang Neo-liberal yang telah terbangun bertahun-tahun di Jerman Barat lebih dijadikan pertimbangan oleh para pemilih dibandingkan identitas individu Merkel sendiri.

Dapat dilihat bahwa struktur politik, dibandingkan faktor-faktor sosial, memainkan peran yang lebih menentukan dalam rekrutmen anggota parlemen. Identitas Merkel sebagai seorang individu tidak memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk citra dirinya menjelang Pemilu karena sistem Pemilu Jerman mengharuskan pemilih untuk memilih partai politik bukan memilih langsung kepada kandidat. Oleh karena itu, identifikasi terhadap partai politik lebih kuat dan lebih determinan dibandingkan identifikasi terhadap kandidat.

#### **4.2.2 Persaingan antar Partai Politik: Konstelasi Kekuatan Politik Jerman Menjelang Pemilu tahun 2005**

Ekonomi merupakan isu kunci dalam pemilu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban dan tingkat pengangguran yang masih di atas 11%, kedua partai politik utama berargumen dengan sengit akan hakikat reformasi ekonomi yang mereka anggap diperlukan. Jurang pemisah antara dua "kubu" telah melebar secara signifikan dalam hal kebijakan, dan Jerman telah mengalami kampanye yang paling terpolarisasi dalam beberapa dekade terakhir. Schröder berusaha mempertahankan kesejahteraan tenaga kerja, dengan merubah gerakan partainya, sementara proposal Merkel lebih liberal tentang reformasi pajak dan tenaga kerja. Kebijakan daerah pun ditandai dengan perbedaan karakter antara dua pemain utama, CDU/CSU dan SPD, termasuk reformasi dalam pasar tenaga kerja, pensiun, kebijakan Eropa, kesehatan masyarakat, dan perpajakan. Masalah pengangguran mendominasi agenda publik dan politik. Di sebagian besar wilayah kebijakan publik, dengan pengecualian dari kebijakan luar negeri (yang tidak memainkan peran utama dalam kompetisi), posisi CDU/CSU lebih

memimpin di atas SPD. Keuntungan ini paling terlihat dalam bidang kebijakan pasar tenaga kerja.<sup>82</sup>

Dari sekitar 61,9 juta warga Jerman yang berhak memilih, diperkirakan sekitar 20 persen bahkan belum dapat menentukan pilihan sampai hari Pemilu tiba. Masyarakat menyadari kegagalan kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Schröder sehingga menginginkan perubahan. Namun, masyarakat juga khawatir dengan program reformasi kubu konservatif CDU/CSU yang terlihat bersemangat untuk memotong program subsidi bagi kesejahteraan rakyat yang telah dinikmati selama ini.<sup>83</sup>

Serikat buruh juga tetap menolak agenda reformasi yang dicanangkan Merkel yang dinilai merugikan para pekerja. Agenda reformasi yang dicanangkan Merkel bertujuan untuk memangkas tingkat pengangguran dan merangsang tingkat pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Caranya dengan menerapkan pajak bagi para pekerja yang melakukan lembur maupun yang bekerja pada hari minggu, serta meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPN). Namun di sisi lain, meskipun SPD selama ini selalu menunjukkan diri sebagai partai pembela kaum pekerja, kegagalan reformasi ekonomi yang dicanangkan Schröder telah mengakibatkan tingkat pengangguran di Jerman mencapai 5 juta orang terbesar sepanjang sejarah pasca PD II. Hal ini telah membuat popularitas Schröder terpuruk di mata para pekerja.<sup>84</sup> Sehingga posisi kebijakan CDU/CSU, meskipun bukan berarti lebih baik, dapat menjadi satu alternatif pilihan.

Kekalahan SPD sudah diduga. Berkurangnya dukungan pemilih terhadap partai politik yang sudah lama berkuasa tetapi tidak mampu membuat terobosan baru

---

<sup>82</sup> Ludger Helms, "Germany's Crisis and Struggle for Political Self-Reinvention: The 2005 Federal Election in Context" dalam *German Studies Review*, Vol. 29, No. 2 (2006), 315-330, hlm. 323, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/27668037> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 15.30 WIB.

<sup>83</sup> Myrna Ratna, "Jerman Memilih: CDU dan SPD Bersaing Ketat," *Kompas*, 19 September 2005, hlm. 11.

<sup>84</sup> Associated Press, Reuters, dan MYR "Jerman: Merkel Masih Sulit Rangkul Buruh," *Kompas*, 8 September 2005, hlm. 8.

adalah fenomena yang lazim.<sup>85</sup> Agenda Reformasi 2010 SPD, yang dirasa diperlukan, mengakibatkan kerugian bagi banyak orang, misalnya berkurangnya keamanan dalam hal tunjangan sosial, pensiun, dan lain-lain.<sup>86</sup> Apalagi, pada saat yang tepat isu-isu kelemahan tersebut dieksploitasi oleh lawan-lawan politiknya. Berkurangnya suara SPD lebih disebabkan karena para pemilih sudah kehilangan kepercayaan terhadap Schröder; bukan karena tawaran politik CDU/CSU lebih baik.<sup>87</sup>

Oleh karena itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada kelebihan yang signifikan yang dimiliki Merkel dibandingkan dengan Schröder. Hanya saja Schröder memiliki citra buruk dan Merkel merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Faktor utama untuk kemenangan Merkel adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap Schröder; tidak ada kekuatan yang lebih unggul dari Merkel.<sup>88</sup>

Perbedaan hasil suara Pemilu antara CDU dan SPD sangat tipis, tidak sampai 1%. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya keduanya menjadi sangat mirip pada saat itu, meskipun pada dasarnya CDU lebih diidentifikasi dengan bisnis, perusahaan, dan ekonomi sementara SPD dimiliki oleh kelas pekerja sosial. Namun dengan perubahan pada arah kebijakan pemerintahan Schröder, membuat produk kebijakan keduanya menjadi mirip.<sup>89</sup>

Namun kebijakan pemerintahan Schröder, yang bertentangan dengan latar belakang partai, inilah yang membuat kelompok-kelompok yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang “Kiri”, gerakan sosial, dan persatuan tenaga kerja menjadi kecewa dan berhenti mendukung SPD dan Schröder. Kekuatan sayap Kiri menjadi terbelah dan masyarakat kehilangan kepercayaan mereka terhadap SPD. Bukan berarti pada saat itu Merkel telah terbukti dapat lebih baik dari Schröder, fokus

---

<sup>85</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, “Seputar Pemilu Legislatif Jerman 2005”, (‘s-Gravenhage, 23 September 2005) diperoleh dari <http://indocase.nl> diakses pada 14 September 2009 pukul 11.03 WIB.

<sup>86</sup> Wawancara Mendalam dengan Bernd Nestler, Pegawai PT Clariant Indonesia, 1 April 2010.

<sup>87</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, *loc. Cit.*

<sup>88</sup> Nestler, *Op. Cit.*

<sup>89</sup> Wawancara Mendalam dengan Philipp Kaupert, Wakil Direktur Lokal Friedrich Ebert-Stiftung Jakarta, 21 April 2010.

kekalahan SPD dan Schröder saat itu hanyalah karena kinerjanya yang buruk.<sup>90</sup> Saat para pekerja kehilangan kepercayaan terhadap SPD inilah, Oscar Lafontaine memulai arah baru dalam politik dengan mendirikan *Die Linke*, sebagai kekuatan baru ketiga yang membawa perubahan peta kekuatan politik Jerman pada Pemilu 2005. *Die Linke* berhasil mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, terutama dari kelompok yang kecewa pada pemerintahan Schröder dan berhenti mendukung SPD, dilihat dari perolehan suaranya pada Pemilu 2005.

Setelah Pemilu, negosiasi untuk membentuk koalisi baru sangat sulit dan memakan waktu berminggu-minggu. Dengan kondisi perbedaan yang tipis, kemungkinan terjadinya “koalisi besar” antara dua partai utama SPD pimpinan Gerhard Schröder dengan CDU pimpinan Angela Merkel semakin sulit diabaikan. Pertama, kedua partai utama ini diyakini tak akan mampu memperoleh mayoritas tunggal. Kedua, walaupun SPD dan CDU masing-masing berkoalisi dengan partai minoritas, koalisi tersebut tidak akan menjadi mayoritas mutlak di Parlemen (*Bundestag*). Dengan demikian, akan sangat riskan bagi partai besar untuk melakukan koalisi dengan partai kecil. Alasannya, koalisi yang menghasilkan mayoritas “tipis” bisa menimbulkan resiko tidak stabil, terutama bila ada anggota partai memiliki simpati terhadap kebijakan oposisi.<sup>91</sup>

FDP tidak memberikan kursi yang cukup besar untuk koalisinya dengan CDU. Merkel, sebagai ketua CDU, pun mengadakan perundingan hari Jumat pagi dengan para pemimpin Partai Hijau untuk menjajaki apakah mereka bisa bersekutu dengannya dan dengan FDP. Partai Hijau, anggota pemerintahan koalisi Schröder yang habis masa jabatannya, pun menolak undangan untuk mengadakan diskusi yang lebih rinci dengan CDU, karena perbedaan yang sangat lebar dalam kebijakan.<sup>92</sup> Maka salah satu opsi yang paling mungkin adalah mementuk “koalisi besar” antara CDU/CSU dan SPD. Namun masalah utama di sini adalah siapa yang akan menjadi

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Myrna Ratna, “Pemilu Jerman: “Koalisi Besar” semakin mungkin,” *Kompas*, 14 September 2005, hlm.10.

<sup>92</sup> Associated Press, Reuters, dan DI, “Pemilu Jerman: Merkel Gagal Tarik Partai Hijau untuk Koalisi,” *Kompas*, 24 September 2005, hlm. 8.



Kanselir, karena Merkel dan Schröder sama-sama berkeras sebagai figur yang paling tepat. Setelah tiga pekan hasil Pemilu diumumkan, Kanselir Gerhard Schröder maupun pemimpin konservatif Angela Merkel belum mencapai kata sepakat tentang siapa yang akan memimpin Jerman.<sup>93</sup>

Kebuntuan politik pun terjadi. Kegagalan politik Jerman pada saat itu digambarkan sebagai krisis politik terbesar yang pernah terjadi di Jerman. Juru bicara CDU/CSU menyatakan bahwa Schröder tak memiliki pilihan lain kecuali mengundurkan diri. Menurut salah satu tokoh CDU, Christian Wulff, kubu konservatif hanya akan berada dalam pemerintahan yang dipimpin Merkel: semua isu bisa dinegosiasikan kecuali satu hal, Kanselir haruslah Angela Merkel.<sup>94</sup> SPD akhirnya harus memberikan jalan bagi pembentukan pemerintahan di bawah kepemimpinan Angela Merkel. Kubu konservatif maupun kubu Sosial-Demokrat sepakat untuk membangun “koalisi besar” (*Grand Coalition*), dan Gerhard Schröder akhirnya memberi jalan bagi Angela Merkel untuk menjadi Kanselir.<sup>95</sup>

Hasilnya, koalisi besar dari SPD dan CDU terbentuk. Hal ini menunjukkan seakan perbedaan plot politik kedua partai tidaklah begitu jelas lagi, seperti blok kanan pada CDU-FDP dan blok kiri pada SPD-Hijau. Akan tetapi saat itu situasinya berbeda, ada kecenderungan untuk membentuk koalisi besar, untuk mencoba menemukan satu jalan bersama, satu konsensus, satu reformasi besar yang membutuhkan bersatunya dua blok politik utama.<sup>96</sup> Koalisi besar membagi kursi kabinet sebagai berikut: CDU dan mitranya CSU mendapat enam kursi kabinet yaitu kementerian pertahanan, interior, pertanian, pendidikan, kekeluargaan dan ekonomi. Adapun SPD mendapat kursi kementerian luar negeri, keuangan, tenaga kerja, hukum, kesehatan, transportasi, lingkungan, dan pembangunan.<sup>97</sup>

Beberapa pengamat berkeyakinan Merkel memang akan meraih kemenangan karena Schröder tidak memiliki cukup waktu untuk mengatasi isu-isu ekonomi yang

<sup>93</sup> Agence France Presse, Associated Press, dan MYR, “Pemilu Jerman: Schröder dan Merkel tetap Bersikeras Incar Kursi Kanselir,” *Kompas*, 10 Oktober 2005, hlm. 11.

<sup>94</sup> Agence France Presse, Associated Press, dan MYR,” *loc. Cit.*

<sup>95</sup> Myrna Ratna, “Sosok Angela Merkel: Sang Kanselir,” *Kompas*, 11 Oktober 2005, hlm. 16.

<sup>96</sup> Wawancara Mendalam dengan Philipp Kaupert, 21 April 2010.

<sup>97</sup> Aknolt Kristian Pakpahan, “Jerman di Bawah Angela Merkel,” *Kompas*, 13 Oktober 2005, hlm. 6.

ada. Namun Schröder masih berharap bahwa kharismanya akan lebih kuat dibandingkan dengan Merkel karena dalam jajak pendapat yang membandingkan dirinya dengan Merkel, Schröder selalu unggul dengan signifikan.<sup>98</sup> Dari berbagai survey yang membandingkan antara Schröder dan Merkel, Schröder secara signifikan dianggap lebih mampu mempresentasikan Jerman, lebih kompeten dalam kebijakan ekonomi dan politik, memiliki otoritas yang lebih berpengaruh, dan mendapat julukan “*man in action*”. Sedangkan Merkel unggul tipis dalam konsep untuk mengatasi masalah masa depan. Khusus mengenai debat kedua tokoh di televisi, Schröder secara mutlak unggul di segala sisi. Meskipun sempat ketika Schröder mengumumkan Pemilu dipercepat, tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pemerintahan turun sampai separuhnya.<sup>99</sup>

Salah satu informan penelitian ini, Nestler, mengakui bahwa pemerintahan Schröder pada saat itu merupakan bencana bagi ekonomi Jerman. Pada masa itulah krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah Jerman paska-PD II.<sup>100</sup> Schröder telah membuat luka ke dalam hati masyarakat, akibat dari pengurangan jaminan keamanan sosial dan sebagainya, yang kemudian membuatnya tidak disukai banyak pemilih. Sedangkan di sisi lain, Merkel tidak memiliki cacat dan hanya membuat janji-janji.<sup>101</sup> Pada saat seperti itulah CDU/CSU, dengan Merkel, muncul sebagai harapan baru dan merupakan satu-satunya opsi “jalan keluar” dari krisis yang ada. Fokus kampanye CDU adalah mengungkap kegagalan ekonomi pemerintahan Schröder yang membuahkan 5 juta pengangguran itu. Rakyat Jerman seakan bisa memulai awal yang baru bersama CDU dan Merkel.<sup>102</sup> Terutama di bidang kebijakan-kebijakan ekonomi, keluarga dan pendidikan, yang menjadi relevan pada saat itu. Ditambah

<sup>98</sup> Associated Press, Agence France Presse, Reuters, dan MYR, “Pemilu Jerman: Partai Angela Merkel Terus Memimpin,” *Kompas*, 30 Agustus 2005, hlm. 8.

<sup>99</sup> Myrna Ratna, “Pemilu Jerman: “Koalisi Besar” semakin mungkin,” *Kompas*, 14 September 2005, hlm. 10.

<sup>100</sup> Associated Press, Agence France Presse, Reuters, dan MYR, *loc. Cit.*

<sup>101</sup> Wawancara Mendalam dengan Bernd Nestler, Pegawai PT Clariant Indonesia, 1 April 2010.

<sup>102</sup> Associated Press, Agence France Presse, Reuters, dan MYR, *loc. Cit.*

dengan adanya Merkel yang membawa modernisasi ke dalam partai, CDU terlihat lebih modern dibandingkan SPD.<sup>103</sup>

Jarrar mengatakan bahwa Schröder harus pergi karena tidak bekerja dengan baik. Bukan hanya karena masa jabatannya telah selesai, akan tetapi juga karena tidak ada kemajuan dalam negara Jerman. Masyarakat Jerman pun dapat berubah pendapat. Jelas, Merkel-lah yang mendapat posisi sebagai Kanselir.<sup>104</sup> Ditambah dengan startegi yang baik untuk menghadapi kondisi ini, Merkel berhasil meraih kemenangannya. Kemenangan ini menunjukkan bahwa visi CDU-Merkel sebagai kesatuan dalam partai politik dinilai lebih penting oleh rakyat Jerman daripada kehidupan pribadi seorang kandidat,<sup>105</sup> ataupun identitasnya.

#### 4.2.3 Pergeseran Perilaku Pemilih

Informan dalam penelitian ini mengakui bahwa ada golongan pemilih yang memilih berdasarkan partai maupun berdasarkan kandidat.<sup>106</sup> Namun pada tanggal 18 September 2005, pada umumnya warga Jerman tidak memilih “tokoh”, melainkan partai politik. Sistem Pemilu Jerman sendiri mengharuskan masyarakat pemilih untuk memilih partai politik, bukan memilih langsung kepada kandidat. Pilihan politik pada Pemilu ini pun dilandaskan pada identifikasi terhadap partai politik, bukan kepada kandidat. Hanya 19 persen pemilih menganggap pertanyaan tentang Kanselir adalah lebih penting daripada komposisi partai pada pemerintahan, dibandingkan 72 persen memiliki pandangan yang berbeda.<sup>107</sup> Oleh karena itu partai politik adalah salah satu komponen penting dalam Pemilu di Jerman. Partai politik adalah faktor yang determinan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik dan memberikan suara saat Pemilu.

<sup>103</sup> Wawancara Mendalam dengan Guido Schnieder, Anggota DAAD, 31 Maret 2010.

<sup>104</sup> Wawancara Mendalam dengan Aisha Maria Jarrar, Anggota DAAD, 30 Maret 2010.

<sup>105</sup> Myrna Ratna, “Sosok Angela Merkel: Sang Kanselir,” *Kompas*, 11 Oktober 2005, hlm. 16.

<sup>106</sup> Wawancara Mendalam dengan Gabriele Otto, Staf Pengajar Program Studi Jerman FIB UI, 31 Maret 2010.

<sup>107</sup> Ludger Helms, “Germany's Crisis and Struggle for Political Self-Reinvention: The 2005 Federal Election in Context” dalam *German Studies Review*, Vol. 29, No. 2 (2006), 315-330, hlm. 323, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/27668037> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 15.30 WIB.

Perilaku pemilih di Jerman yang memilih berdasarkan partai ini dapat dikategorikan ke dalam mahzab Colombia atau dikenal dengan model/pendekatan sosiologis, ataupun mahzab Michigan atau dikenal sebagai model/pendekatan sosio-psikologis. Kedua mahzab ini menunjukkan bahwa dalam menentukan pilihan politiknya, masyarakat Jerman terpengaruh oleh identifikasi partai politik yang telah terbangun berpuluh tahun, sebagai kontinuitas sejarah. Identifikasi partai politik ini yang menjadi dasar bagi pemilih menentukan pilihan politiknya. Agar lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut Mahzab Michigan, masyarakat pemilih menentukan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses pengembangan dirinya sendiri (sosialisasi). Melalui proses sosialisasi kemudian berkembanglah ikatan psikologis yang kuat antara seorang individu dengan salah satu organisasi massa atau organisasi politik yang berwujud simpati terhadap partai politik, yang dikenal sebagai identifikasi kepartaian.<sup>108</sup> Identifikasi kepartaian inilah yang membentuk pertimbangan politik pemilih. Hal ini masih bisa ditemukan dalam kelompok-kelompok pemilih yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan tradisi. Contohnya seperti Jarrar yang masih memandang CDU berdasarkan tradisi Kristen (katolik)nya.<sup>109</sup> Dan seperti Kaupert yang dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh tradisi dari departemen tempatnya bekerja.<sup>110</sup>

Sedangkan Mahzab Colombia memandang masyarakat sebagai suatu yang bersifat hierarkis, terutama didasarkan atas status, masyarakat secara mempunyai kesadaran status yang sangat kuat dan sudah tertata sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang pekerjaan dan penghasilannya, diurutkan sesuai dengan latar belakang sosialnya. Mahzab ini lebih menekankan pada peranan faktor sosiologis di dalam

---

<sup>108</sup> Affan Gaffar dalam Djoko Susilo, *Laporan Penelitian: Tingkah Laku Politik Masa Pinggiran Dalam Pemilu 1992*, Disertasi Doktor, (Jember: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Jember Pusat Penelitian Tahun 1992, 1992), hlm. 17-18.

<sup>109</sup> Wawancara Mendalam dengan Aisha Maria Jarrar, Anggota DAAD, 30 Maret 2010.

<sup>110</sup> Wawancara Mendalam dengan Philipp Kaupert, Wakil Direktur Lokal Friedrich Ebert-Stiftung Jakarta, 21 April 2010.

membentuk perilaku politik seseorang.<sup>111</sup> Di Jerman, pemilih dipengaruhi oleh kelas-kelas dan kesadaran status-status yang terbentuk dalam masyarakat.

Kesenjangan, terutama dalam hal ekonomi dan politik, telah membelah masyarakat Jerman Barat dan Jerman Timur ke dalam kelas dan status yang berbeda. Status yang berbeda ini menumbuhkan semacam kebanggaan dari masing-masing kelompok, Jerman Timur dan Jerman Barat bukan sekedar pembagian wilayah namun juga pembagian “status”. Dimana kelas Jerman Barat dengan nilai-nilai demokratis dan memiliki pertumbuhan ekonomi lebih dibandingkan dengan kelas Jerman Timur yang sosialis dengan kelesuan pertumbuhan ekonominya. Klasifikasi kelas ini telah menumbuhkan identifikasi status sosial yang spesifik bagi para anggota masyarakatnya. Identifikasi ini terbentuk berbeda antara kedua kelompok kelas yang tumbuh terpisah, yang membedakan karakter kelompok masyarakat Jerman Timur dengan kelompok masyarakat Jerman Barat.

Di Jerman, sebagaimana di Amerika Serikat dan di banyak negara lain, faktor kultural dan sikap terhadap isu-isu non-ekonomi memegang peranan penting dalam identifikasi partai dan perilaku politik.<sup>112</sup> Partai politik di Jerman memobilisasi dukungannya berdasarkan status dan kelas yang terbentuk di tengah masyarakat Jerman. Dalam Pemilu di Jerman, Identifikasi partai politik yang seperti ini seakan terbentuk menjadi kecendrungan masyarakat Jerman Timur, yang (bekas) sosialis, untuk mendukung partai Kiri seperti SPD dan masyarakat Jerman Barat, yang lebih liberal, untuk mendukung CDU/CSU. CDU lebih diidentifikasi dengan kelas bisnis dan perusahaan sementara SPD dimiliki oleh kelas pekerja sosial.<sup>113</sup>

Kepentingan-kepentingan kelas mungkin menyebabkan terbentuknya partai, misalnya, usaha untuk menentukan upah kerja buruh.<sup>114</sup> Ini seperti yang dilakukan oleh CDU maupun SPD. Kebijakan CDU lebih bersifat pro terhadap kelas pengusaha

---

<sup>111</sup> Gaffar, *Op. Cit.*

<sup>112</sup> Ludger Helms, “Germany’s Crisis and Struggle for Political Self-Reinvention: The 2005 Federal Election in Context” dalam *German Studies Review*, Vol. 29, No. 2 (2006), 315-330, hlm. 323, diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/27668037> (Jstor) database, diakses pada 07 April 2010 pukul 15.30 WIB.

<sup>113</sup> Kaupert, *Op. Cit.*

<sup>114</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 251.

dan bisnis, sementara SPD melindungi kelas pekerja. Namun kemudian pemerintah Schröder mengeluarkan kebijakan yang menjauh dari karakter dasar partai. Perubahan ini terjadi karena kesadaran Schröder akan diperlukannya dukungan dari sektor bisnis dan perusahaan untuk mengatasi krisis yang ada, sehingga politik peduli terhadap kelas pekerja sebaiknya berubah sedikit menyadari adanya banyak kehilangan dalam negara dan sebagainya.<sup>115</sup> Schröder, yang adalah rezim sosialis malah memotong banyak jaminan sosial dalam kebijakannya. Perubahan yang dilakukan Schröder ini membawa kegoyahan bagi keyakinan akan identifikasi partai yang dimiliki oleh pendukung SPD.

Akibat dari penyimpangan arah yang dilakukan Schröder, terjadi pergeseran perilaku pemilih di Jerman. Pemilih tetap memilih berdasarkan partai politik namun tidak lagi berlandaskan pada pola-pola kultural seperti berdasarkan tradisi ataupun kebanggaan akan suatu status spesifikasi kelas. Pilihan politik lebih dilakukan secara sengaja, bukan berdasarkan kebanggaan tertentu.<sup>116</sup> Identifikasi terhadap partai politik yang terbentuk di kalangan pemilih tidak lagi merupakan hasil dari proses sosialisasi yang diterima begitu saja dari tradisi, isu-isu kultural dan non ekonomis. Masyarakat menjadi menentukan pilihan berdasarkan tujuannya.<sup>117</sup>

Masyarakat menentukan pilihan berdasarkan isu-isu yang lebih ekonomis dan ideologis. Seperti pada saat kekuatan Kiri pecah saat *Die Linke* memutuskan untuk berdiri sendiri karena kekecewaan terhadap SPD. Hal ini terjadi karena adanya aksi yang dilakukan SPD yang bergeser dari garis dasar ideologisnya. Kaum Kiri yang kecewa tidak lagi memilih SPD berdasarkan tradisi yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Kebanggaan atas status tertentu pun telah hilang karena SPD sendiri telah bertindak ke luar dari klasifikasi yang telah ada. Maka kelompok pemilih Kiri ini akan lebih menggunakan pilihan rasional untuk *Die Linke* berdasarkan kebutuhan ekonomis dan ideologis pemilih.

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Wawancara Mendalam dengan Bernd Nestler, Pegawai PT Clariant Indonesia, 1 April 2010.

<sup>117</sup> Wawancara Mendalam dengan Gabriele Otto, Staf Pengajar Program Studi Jerman FIB UI, 31 Maret 2010.

Mayarakat Jerman pun telah bergeser ke arah pendekatan pilihan rasional yang berdasar pada isu-isu ekonomis. Pendekatan ini berkaitan dengan dua orientasi. Orientasi kandidat dan orientasi isu. Namun orientasi isu, yaitu orientasi yang mengacu pada tema atau isu-isu yang diangkat oleh sebuah partai politik,<sup>118</sup> muncul lebih mendominasi karena berasal langsung dari partai politik. Partai politik dipilih dan diberi dukungan dari masyarakat berdasarkan isu-isu yang diangkat dalam produk kebijakan maupun tema kampanyenya. Seperti yang dilakukan CDU dan Merkel, yang telah berhasil mengolah isu-isu ekonomis untuk tampil sebagai satu alternatif pilihan yang baik dan konsisten terhadap garis ideologisnya, dibandingkan dengan apa yang telah pemerintahan Schröder dan SPD lakukan atas krisis ekonomi dalam negeri. Dan menjelang Pemilu SPD masih kalah populer dibandingkan dengan CDU.<sup>119</sup>

Saat Merkel menjadi kandidat dari CDU, pemilih tidak melihat identitas Merkel sebagai individu kandidat. Pemilih tetap melihat kepada partai politik tempat Merkel bernaung yang memiliki kebijakan yang pro terhadap kelas pebisnis. Contohnya jika ada seorang pemilih dari Timur yang memilih CDU-Merkel dalam Pemilu. Pemilih ini tidak akan memilih Merkel karena sama-sama berasal dari wilayah (bekas) Jerman Timur, akan tetapi lebih karena jika pemilih ini adalah seorang pebisnis yang memilih CDU karena kebijakan partai yang berpihak kepada kelas sosial ekonominya. Hal yang lebih penting adalah ide dan ideologi politik ditambah kualitas personal daripada identitas kandidatnya.<sup>120</sup>

Bagi golongan pemilih yang melihat kepada kandidat, Merkel telah berhasil menarik perhatian masyarakat dengan figur yang kental akan kebaikan dari kualitas-kualitas personal seseorang. Kondisi dalam negara Jerman pada saat itu, dengan krisis ekonomi yang besar, membuat masyarakat lebih rasional dalam melihat kepada kinerja dari kandidat dan partai, bukan kepada identitasnya.<sup>121</sup> Kandidat mana yang

<sup>118</sup> Adman Nusrul, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 64.

<sup>119</sup> Associated Press, Agence France Presse, Reuters, dan MYR, *Kompas*, 30 Agustus 2005, hlm. 8.

<sup>120</sup> Kaupert, *Op. Cit.*

<sup>121</sup> Wawancara Mendalam dengan Aisha Maria Jarrar, Anggota DAAD, 30 Maret 2010.

terlihat dapat membawa kondisi negara menjadi lebih baik, yang menawarkan harapan baru untuk masyarakat.

